

**SKRIPSI**  
**MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN**  
**TERUMBU KARANG DI KABUPATEN WAKATOBI**

WA ODE NUR HUDAYA

Nomor Stambuk: 105610484114



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS**  
**MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN  
TERUMBU KARANG DI KABUPATEN WAKATOBI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi  
Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

**Wa Ode Nurhudaya**

Nomor Stambuk: 10561 0481 14

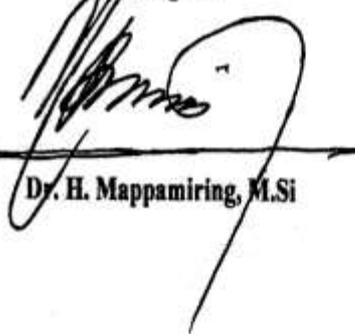
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOCIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan  
Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi  
Nama Mahasiswa : Wa Ode Nurhuda  
Nomor Stambuk : 105610484114  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

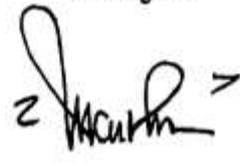
Menyetujui:

Bimbingan I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Bimbingan II



Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1200/FSP/A I-VII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



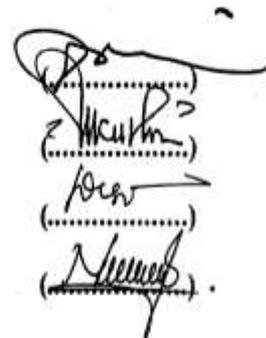
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si
4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP



## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan  
Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi

Nama Mahasiswa : Wa Ode Nurhuda

Nomor Stambuk : 105610484114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Bimbingan I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Bimbingan II



Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketian jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

## **ABSTRAK**

### **Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi (dibimbing oleh Mappamiring dan Musliha Karim).**

Manajemen strategi merupakan keputusan yang biasa menghasilkan perencanaan strategi dan pelaksanaan strategi dengan rencana-rencana yang dirancang oleh pimpinan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kembali langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Wakatobi untuk mengelola terumbu karang melalui manajemen strategi baik dalam proses analisis strategi maupun proses implementasi strategi sehingga strategi yang direncanakan dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengidentifikasian manajemen strategi mengenai langkah-langkah pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan terumbu karang belum optimal karena kondisi terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dalam keadaan kritis yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya masih maraknya pemboman ikan serta penggunaan sianida. Hal tersebut disebabkan (a.) proses manajemen strategi belum dilakukan dengan semestinya baik dalam menganalisis lingkungan internal maupun menganalisis lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang, selain itu proses implementasi yang belum efektif seperti masih kurangnya pengawasan dalam pengelolaan terumbu karang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dan kualitas SDM yang masih minim. (b.) keunggulan pelaksanaan strategi ini seperti acuan pengelolaan terumbu karang selanjutnya, serta kendala pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang pemerintah kurang menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang serta kinerja yang kurang efektif.

**Kata Kunci: Strategi Pengelolaan Terumbu Karang**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatub*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi**”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammdiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dengan penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, M.M selaku rektorat Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelola fakultas dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administratsi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
5. Buat saudara-saudariku tercinta, dan teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Penerimaan Tim .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Manajemen Strategi .....	9
B. Keuntungan dan kegagalan manajemen strategi.....	17
C. Pengelolaan Terumbu Karang .....	19
D. Kerangka Pikir .....	27
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Pengabsahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Proses Manajemen Strategi dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi .....	41

C. Keunggulan dan Kegagalan Manajemen Strategi dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi .....	73
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Nama Gambar</b>	<b>Halaman</b>
	Gambar 1.1 Bagan kerangka pikir .....	27

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Nama Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Daftar Informan Penelitian .....	31
Tabel 1.2.	Matriks Analisis SWOT .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manajemen strategi pengelolaan sumber daya pesisir merupakan usaha yang harus diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan perubahan dari UU No. 27 tahun 2007. Pengelolaan sumber daya pesisir ini harus dilakukan karena sumber daya alam memiliki batas kemampuan maksimal, yang jika pemanfaatannya sudah mencapai titik puncak, pasti produktivitas akan menurun. Salah satu sumber potensi pesisir yang mempunyai manfaat yang sangat banyak namun terancam kritis akibat dari efek pemanfaatan secara berlebihan adalah terumbu karang.

Terumbu karang beserta seluruh aktivitas yang ada didalamnya adalah salah satu sumber daya alam yang tak ternilai. Keuntungan yang terdapat didalam ekosistem tersebut sangat banyak dan beragam, baik keuntungan secara langsung maupun keuntungan secara tidak langsung sehingga di perlukan pengelolaan kelestariannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya serta Keputusan Menteri kelautan dan perikanan Nomor: Kep.38/Men/2004 tentang pedoman umum pengelolaan terumbu karang.

Kabupaten Wakatobi adalah Kabupaten yang terletak di Indonesia bagian Timur. Kepulauan Wakatobi memiliki destinasi wisata hayati dibawah laut yang

sangat indah. Kabupaten Wakatobi memiliki perairan yang berpotensi dan pantai yang sangat indah selain itu, perairan Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu tempat wisata bahari yang sangat indah di Indonesia dengan keindahan terumbu karang yang dimilikinya. Perairan di Kepulauan Wakatobi mempunyai beragam jenis terumbu karang serta berbagai biota laut. Perairan ini memiliki beberapa tipe terumbu karang yang masih asli seperti, terumbu karang tepi atau pantai (*fringing reefs*), gosong terumbu (*patch reefs*), terumbu karang cincin (*atoll*), serta terumbu karang penghalang (*barrier reefs*). Dari keempat tipe tersebut dapat dijumpai di perairan Wakatobi, CORMEP (2016).

Kekayaan ekosistem terumbu karang ini merupakan aset bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat di Kepulauan Wakatobi, karena 60%, masyarakat Wakatobi bermukim dikawasan pesisir, sehingga tingkat ketergantungan dengan ekosistem tersebut cukup tinggi. Manfaat yang dimiliki ekosistem tersebut sangat penting untuk kehidupan masyarakat di Kabupaten Wakatobi, baik secara ekologis maupun secara ekonomi. Secara ekologis, terumbu karang berperan sebagai rumah dari beragam jenis ikan karang yang menjadi tangkapan para nelayan; untuk melindungi pantai dari ombak dengan jalan memecah ombak; Secara ekonomi, dapat membantu pemasukan melalui pariwisata bahari. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat pesisir yang memanfaatkan karang mati sebagai fondasi rumah Lubis, et. al (2016).

Tingkat ketergantungan yang tinggi inilah yang mengharuskan pemerintah melestarikan keanekaragaman terumbu karang tersebut. Pemerintah Kabupaten Wakatobi berusaha untuk meluncurkan berbagai program untuk menekan laju

eksploitasi sumber daya alam seperti terumbu karang dan berbagai kepentingan masyarakat. Strategi-strategi ini dilaksanakan untuk mencegah kawasan laut Kabupaten Wakatobi agar terhindar dari dampak yang merugikan. Namun, pada kenyataannya strategi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah daerah Wakatobi dari hasil penilaian yang telah diimplementasikan masih menunjukkan adanya banyak kekurangan dalam hal perumusan strategi maupun pelaksanaannya.

Kekurangan yang dimaksudkan diatas dapat dilihat dari keadaan terumbu karang di perairan Wakatobi yang tersebar pada kawasan sekitar 1,3 juta hektar, 22,88 persen yang tak lepas dari dampak aktifitas manusia. Keadaan kerusakan di perairan Wakatobi tersebut disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti pemboman, membius ikan dengan menggunakan pukat harimau, Yulius et. al (2015). Beberapa penelitian terumbu karang di perairan Wakatobi sudah dilakukan sebelumnya. Wilson et. al. dalam Yulius et. al. (2015), mendapati sebanyak 65% karang mengalami efek pemutihan, akan tetapi mortalitasnya diduga sedikitnya 5%. Fakta bahwa masih terjadinya kegiatan perusakan serta eksploitasi secara berlebihan terjadi dilokasi pengelolaan terumbu karang menunjukkan bahwa daerah perlindungan bagi ekosistem tersebut belum sepenuhnya terjaga. sehingga diperlukannya pengidentifikasian manajemen strategi terhadap program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Pengidentifikasian manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kepulauan Wakatobi sangat penting untuk dilakukan, karena sebagai langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk dapat

memperbaiki kembali strategi yang ada Sehingga lingkungan ekosistem laut Wakatobi tidak Rusak dan dapat menunjang pengembangan perikanan masyarakat. Berdasarkan Pearce et.al dalam Yunus (2016). Pendekatan Manajemen strategi yang baik adalah dengan melakukan tindakan yang biasa menghasilkan perencanaan strategi dan pelaksanaan strategi dengan rencana-rencana yang dirancang pimpinan untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Namun strategi-strategi yang di luncurkan pemerintah Kabupaten Wakatobi masih menunjukkan banyaknya kekurangan.

Yunus (2016), Manajemen Strategi adalah langkah-lagkah kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendasar serta keseluruhan, disertai cara penetapan pelaksanaannya yang dirumuskan oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan ruang lingkup pekerjaanya manajemen strategi terbagi menjadi dua yaitu dimanfaatkan untuk lingkungan makro seperti yang berada pada manajemen pemerintahan dan dimanfaatkan untuk lingkungan mikro seperti yang berada pada manajemen perusahaan atau organisasi, Taufiqurokhman, (2016). Manajemen Strategi dalam penelitian pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi disini termasuk ruang lingkup lingkungan makro, dimana pendekatan yang harus dilakukan pemerintah Wakatobi melalui Manajemen Strategi untuk melihat kembali program-program dalam pengeloan terumbu karang.

Lingkungan makro yang dimaksudkan ialah dimana perhatian subyek dan obyek berupa para masyarakat yang bersifat *aggregate*, disamping itu, perihal

tentang pedoman kerja dalam manajemen strategi dilingkungan makro ini, perhatiannya mengarah pada efektifitas. Manajemen strategi dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi sudah sejauhmana pencapaian yang dihasilkan strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Serta, penelitian ini juga akan menyingkapi hal-hal yang terjadi dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sampai akhirnya akan dilihat perbaikan-perbaikan apa yang akan dirumuskan untuk memperbaiki strategi-strategi yang telah ada.

Pengidentifikasian kembali strategi ini diperlukan karena bersamaan dengan perkembangan waktu strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi mengalami dinamika yang berubah-ubah dari zaman ke zaman. Fungsi sumber daya hayati laut khususnya terumbu karang di Kabupaten Wakatobi saat ini belum mengarah kepada fungsi sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat diamati dari tidak terkendalinya kegiatan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Wakatobi, masih adanya penggunaan media tangkap yang dapat merusak lingkungan seperti bom dan bius, maraknya pengambilan batu karang sebagai bahan bangunan, lemahnya penegakan hukum. Data diatas memperlihatkan bahwa rumusan strategi yang diupayakan pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk menekan laju eksploitasi sumber daya terumbu karang masih memiliki kekurangan. Dalam merumuskan startegi pengelolaan terumbu karang, pemerintah Kabupaten Wakatobi kurang memperhatikan ancaman-ancaman kerusakan sumber daya terumbu karang. Strategi-strategi ini belum mencapai tujuannya karena pada tahap implementasi strategi belum maksimal

dimana kurangnya sarana dan prasarana untuk mengawasi masyarakat dalam mengexploitasi sumber daya terumbu karang.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang meyebabkan ancaman bagi sumber daya terumbu karang. Hal tersebut dapat terlihat dari penelitian Arami dalam Adimu (2013), sebelumnya menunjukkan bahwa media yang digunakan seperti bubu dan sero untuk menangkap ikan ini ternyata menimbulkan dampak kerusakan terumbu karang, karena nelayan masih menggunakan batu karang untuk menindih bubu serta pemasangan tiang pancang alat tangkap sero di areal terumbu karang. Kondisi ini semakin diperparah dan menambah kerusakan jika nelayan masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak dan racun ikan (potassium sianida), maupun aktifitas lain, seperti penambangan pasir pantai, batu karang, dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut pengidentifikasian Manajemen Strategi ini perlu dilakukan karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada program-program yang telah dikeluarkan pemerintah di Kabupaten Wakatobi masih menunjukkan adanya kekurangan terkait pemilihan strategi. Pendekatan Manajemen Strategi dalam pengelolaan terumbu karang sangat penting dilakukan karena sebagai langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk dapat menganalisis kembali program-program kebijakan terkait dengan pengelolaan terumbu karang.

Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Wakatobi dalam mengelola terumbu karang. Dalam penelitian ini, upaya penyempurnaan dilakukan dalam melihat

aspek-aspek yang kurang diperhatikan dalam penyusunan program-program strategi selama ini, baik dalam hal sosial maupun ekologis. Kelestarian dalam mengelola terumbu karang Pemerintah menuangkan dalam berbagai strategi yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan dari berbagai faktor.

Suryawati et.al (2012), Apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dilakukan secara cermat, maka dapat diharapkan bahwa kinerja dari program tersebut akan baik. Kenyataannya, program tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa bagian yang diabaikan yang berdampak pada kesempurnaan strategi yang dilaksanakan. Dengan menerapkan bagian tersebut serta bagian-bagian penting lainnya, akan dilakukan melalui pendekatan analisis pengambilan keputusan melalui Manajemen Strategi, diharapkan strategi perbaikan akan menghasilkan serta dilaksanakan dalam program-program Pemerintah Kabupaten Wakatobi di masa yang akan datang, sehingga kinerjanya dapat menjadi lebih baik. Hal inilah yang kemudian menginspirasi penulis untuk melihat dan melakukan penelitian dengan judul : **“Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut hasil deskripsi dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi?

2. Bagaimana keunggulan dan kendala manajemen Strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kendala manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam mengetahui manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi, Khususnya pada mata kuliah Manajemen Strategi sekurang-kurangnya berguna sebagai sumbangan pemikiran.

2. Manfaat praktisi

Menambah wawasan penulis mengenai manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten wakatobi., untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Manajemen Strategi**

##### **1. Pengertian Manajemen Strategi**

Makmur (2013), memberikan pengertian manajemen strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan, (sosial, politik, ekonomi, alam, dan ilmu pengetahuan) serta pengamatan taktik yang digunakan orang-orang, di organisasi lain. Manajemen strategi merupakan level tertinggi dalam aktivitas manajemen. Manajemen strategi bukanlah suatu tugas, melainkan suatu rangkaian kemampuan manajerial yang diterapkan keseluruhan dalam organisasi dengan berbagai fungsi. Manajemen strategi dapat dilihat dari kombinasi dari rumusan strategi dan implementasi strategi, namun strategi harus erat dengan tujuannya.

Manajemen strategi merupakan langkah-langkah keputusan dan pelaksanaan yang mendasar serta diputuskan oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan di seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, kiranya banyak yang mengetahui bahwa istilah strategi semula berasal dari kalangan militer serta sering dikenal sebagai kunci yang digunakan oleh para jenderal untuk suatu peperangan, Siagian (2016).

Yunus (2016), Manajemen strategi pada seluruh ruang lingkup pekerjaannya, dengan demikian dapat dimanfaatkan secara baik untuk lingkungan makronya,

misalnya didalam manajemen pemerintahan serta bisa digunakan untuk lingkungan mikronya seperti didalam manajemen perusahaan atau organisasi. Akan tetapi, disini harus perlu dipahami bahwa didalam memanfaatkan bagian dari lingkup makro dan mikro memiliki sejumlah perbedaan begitu mendasar meliputi sebagai berikut:

- a. Kebijakan makro yang harus diperhatikan adalah subyek dan obyek dalam suatu manajemen tersebut merupakan yang berupa para masyarakat yang memiliki perilaku *aggregate*, sedangkan untuk ruang lingkup mikro, maka perhatiannyapun terhadap subyek dan obyek disuatu manajemen berupa individual rumah tangga perusahaan atau para pelanggan yang memakai hasil produksi.
- b. Disamping itu, mengenai pandangan kegiatan untuk manajemen strategi makro kemungkinan pusat perhatiannya pada efektivitas, sedangkan untuk manajemen strategi yang rangkumannya secara mikro disesuaikan kepada prinsip kerja efisiensi.

Manajemen strategi ini juga adalah serangkaian metode yang digunakan sebagai salah satu kesatuan utuh yang mempunyai bagian yang saling berhubungan serta mempengaruhi antara satu dan lainnya serta bergerak secara bersama-sama mengacu pada arah yang sama pula Taufiqurokhman (2016). sedangkan Michelet.al dalam Taufiqurokhman (2016), menulis manajemen strategi merupakan sistem untuk membangun organisasi dalam menganalisis keinginan yang ingin dicapainya serta bagaimana cara organisasi mencapai hal yang bernilai tersebut. Bagian ilmu manajemen strategi ini akan selalu

berkesinambungan dalam menyikapi gerak-gerik yang terjadi baik itu dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang kemudian akan terus terjadi dengan bagaimana cara untuk berusaha menyesuaikan hingga pada akhirnya pada tujuan yang telah ditetapkan itu dapat segera terlaksana atau direalisasikan dengan baik. Viljoen, dalam Heene (2010), mengutarakan sebuah pengertian yang benar-benar ringkas dengan anggapan bahwa manajemen strategi merupakan suatu proses dari penganalisan, pemilihan, dan pengimplementasian dari kegiatan-kegiatan yang dapat membenahi kinerja jangka panjang dari organisasi melalui penetapan arah disertai komitmen ataupun penyesuaian antara keahlian internal dari tujuan-tujuan dari organisasi.

Certo dalam Yunus (2016) manajemen strategi sebagai analisis, keputusan, dan aksi, yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Makna tersebut menjelaskan dua komponen pokok manajemen strategi. Komponen pertama, manajemen strategi dalam sebuah organisasi berhubungan dengan proses yang berjalan (*ongoing processes*): analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategi berkaitan bagaimana manajemen mengidentifikasi sasaran strategis (visi, misi, tujuan) serta keadaan internal dan eksternal yang dihadapi organisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menciptakan keputusan strategis. Pilihan ini harus pintar dalam menanggapi dua pertanyaan utama, yakni industri apa yang digemari organisasi serta bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan akan memotivasi atasan untuk mendistribusikan sumber daya dan mempersiapkan organisasi untuk mengganti rencana menjadi realita.

Komponen kedua, manajemen strategi adalah studi mengapa sebuah organisasi dapat menaklukkan organisasi lainnya. Manajer harus memastikan bagaimana organisasi dapat membuat keunggulan bersaing yang bukan hanya istimewa dan berharga, tetapi juga sukar untuk dijiplak atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lama. Keunggulan bersaing yang dapat bertahan lama, kebanyakan dihasilkan dengan melaksanakan kegiatan berlainan dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melaksanakan kegiatan yang sama dengan cara yang berbeda.

Manajemen strategi memiliki pengertian dengan muatan yang sangat banyak, baik secara teoritis maupun dalam praktek manajemen, berdasarkan pertimbangan keutamaan dari penciptaan dan pendistribusian nilai dalam setiap peran organisasi, maka berikut ini gambaran “manajemen strategi” sebagai kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang kembali mengulang dalam menghasilkan nilai dan keahlian yang dapat mengantar serta memperluas penghasilan kepada pelaksana kebutuhan ataupun pihak lain yang berkepentingan, Heene (2010). Artinya, manajemen strategi menjadi satu kesatuan dari keseluruhan proses yang terintegrasi yang dapat dibedakan kedalam enam strata yaitu: Tindakan terlampau sistematis, anggapan serta adanya beragam persiapan porsi untuk mewujudkan penciptaan nilai tersebut, tidak terlampau sistematis, memilih satu atau lebih dari beragam kesempatan untuk penciptaan nilai, pengembangan lebih lanjut berbagai kemungkinan untuk menciptakan nilai, dan mencari dan menguraikan beragam

kesempatan untuk memperoleh sarana-sarana yang sangat dibutuhkan demi meraih penciptaan nilai.

## **2. Proses Manajemen Strategi**

Proses manajemen strategi adalah suatu proses tahapan-tahapan yang ada dalam manajemen strategi, biasanya yang mendukung proses yang berada pada posisi pimpinan, mereka diakui mempunyai kekuatan, dan kewenangan untuk bertanggung jawab dengan organisasi untuk memiliki proses strategi dan memiliki kekuatan untuk mengarahkan orang dalam melakukan kehendak organisasi Yunus (2016). Manajemen strategi yang umum diterima sekarang ini memang merupakan buah pemikiran para tokoh seperti H. Igor Ansoff dan A.D.Chandler serta beberapa pemikiran lain dibidang manajemen strategi. Paradigma manajemen strategi yang dianut sampai sekarang ini pada umumnya menggunakan pendekatan proses yang berisikan elemen-elemen Utomo (2014). Pendekatan proses manajemen strategi yang berisikan elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Analisis SWOT**

Priyono (2016), tujuan utama analisis SWOT (internal dan eksternal) dilakukannya analisis lingkungan adalah untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengts*) dan menentukan kelemahan (*weakness*) serta untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) yang harus segera mendapat perhatian serius dan pada saat yang sama organisasi menentukan beberapa kendala ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi. Dalam melakukan analisis terhadap lingkungan organisasi, hal

penting yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi beberapa variabel pokok yang mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan. Hal itu berarti perusahaan hanya berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah variabel secara terbatas (relevan), dan tidak sampai terjerumus untuk berusaha menganalisis sebanyak mungkin variabel (*infinite*).

Analisis ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan lingkungan eksternal dan dampaknya. Serta pada analisis internal bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan strategi yang penting bagi perumusan strategi suatu organisasi. Melalui aplikasi SWOT (analisis lingkungan internal dan eksternal) diharapkan suatu organisasi dapat mengambil kebijakan strategi yang sesuai dengan masalah dan penanganan yang efektif di dalam tubuh organisasi. Analisis SWOT dapat membantu pimpinan dalam membaca suatu fakta yang penting dan relevan dalam analisis internal dan eksternal.

Analisis lingkungan adalah suatu tahapan pertama dalam proses manajemen strategi untuk mengetahui karakter lingkungan organisasi. Lingkungan tersebut terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan Nugraha (2007), untuk organisasi pemerintahan, analisis lingkungan internal menyangkut struktur organisasi, kewenangan situasi pegawai (SDM), dan sebagainya. Sedangkan analisis lingkungan eksternal yaitu memuat lingkungan secara umum dan lingkungan pemerintahan, seperti kondisi pertahanan, keamanan sosial, ekonomi, serta politik.

## **b. Pilihan Strategi**

Proses analisis pada diagnosis yang dilakukan terhadap dua komponen tersebut selanjutnya akan mencari kesesuaian karakter antara visi dan misi yang diimbun dan kekuatan internal serta pengaruh dari kekuatan lingkungan makro-eksternal. Dan selanjutnya akan menawarkan alternatif strategi bagi manajer. Sebelum proses pemilihan strategi ini dilakukan kemudian akan diikuti dengan penetapan visi organisasi. Menurut Yunus (2016), Visi biasanya diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan “ *what do we want to become?*” (akan seperti apakah hidup kita dimasa depan?).

Visi sulit untuk dapat dituliskan secara lebih jelas dalam menjelaskan secara jelas uraian sistem yang diinginkan, karena transisi ilmu serta keadaan yang sulit diramalkan selama waktu yang panjang untuk mencapainya. Yang kedua adalah penetapan misi organisasi. Sesuai Priyono (2016), misi merupakan suatu tujuan istimewa yang membedakan dari organisasi-organisasi lain yang serupa serta mengidentifikasi cakupan operasinya. Selanjutnya adalah penetapan Tujuan organisasi. Sama halnya dengan misi organisasi, tujuan organisasi juga sangat penting untuk ditetapkan. Berdasarkan Priyono (2016), tujuan merupakan pijakan pertama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi, atau dengan kata lain tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai. Setelah proses tersebut dilakukan maka akan dilakukan keputusan strategi yang layak. Keputusan strategi ini merupakan elemen kunci dari pengambilan keputusan pada pemilihan strategi, manajer yang sukses akan memilih strategi

yang memberikan organisasi mereka keuntungan yang paling menguntungkan.

### **c. Implementasi Strategi**

Proses implementasi strategi merupakan suatu kewajiban dan tantangan utama seorang manajer umum (*general manager*). Bukan hanya untuk menguraikan, tetapi manajer juga harus mampu merumuskan serta mengevaluasi serangkaian strategi yang akan dilaksanakan perusahaan. Tetapi, berbagai strategi tersebut harus diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan konkrit dan dikendalikan dengan seksama, Utomo (2014). Implementasi strategi juga sering disebut sebagai proses tindakan manajemen strategi. Proses implementasi strategi berarti membobolisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dipilih sebagai tindakan strategi.

Priyono (2016), Implementasi strategi merupakan sebuah pelaksanaan yang akan mengelola berbagai sumber daya organisasi serta manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi (keuangan, manusia, peralatan, dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Pemanfaatan sumber daya organisasi ini terdiri dari beberapa hal. Seperti, pengawasan dan kualitas SDM.

#### **1. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan strategi organisasi. Menurut Kedarisman dalam Hamrun (2012), pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang

telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula. Sedangkan menurut Siswandi (2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.

## **2. Kualitas SDM**

Kualitas SDM dalam pelaksanaan strategi Organisasi. Berdasarkan Priyono (2007), organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai *input* untuk diubah menjadi *output* berupa produk. Sumber daya tersebut berupa modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi. Diantara berbagai macam sumber tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang paling penting. Kualitas SDM merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki manusia. Karena kualitas SDM ini dapat mempengaruhi pekerja yang mengarah pada tujuan organisasi. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009) SDM adalah tenaga kerja atau pegawai didalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. SDM yang berkualitas adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif.

## **B. Keunggulan dan Kendala Manajemen Strategi**

### **1. Keunggulan Manajemen Strategi**

John et.al.(2013), Keunggulan manajemen strategi merupakan manfaat yang diperoleh suatu organisasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang dapat memberikan pengetahuan yang besar dalam mengembangkan kembali strategi-

strategi berikutnya. Manajemen strategi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi para pembuat keputusan dengan mengidentifikasi berbagai problema-problema yang terjadi dalam suatu organisasi.

Manajemen strategi merupakan perilaku jenjang manajerial yang mengutamakan tujuan dari pada siasat. Manajemen strategi merupakan arah yang akan diambil organisasi. Bagaimana pun juga, hal ini tidak hanya terbatas pada manajer, namun juga direktur dan pemegang saham lain dalam struktur internal manajemen. Manajemen strategi keseluruhan adalah proses berkelanjutan yang mengontrol organisasi dan industri yang mempengaruhinya. Beberapa keuntungan dalam menerapkan manajemen strategi Taufiqurokhman (2016), yaitu, Memberikan arah jangka panjang yang akan di tuju, Membantu organisasi menjadi lebih efektif, Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko, Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi.

## **2. Kendala Manajemen Strategi**

John et.al (2013) Kendala manajemen strategi adalah tidak tercapainya pelaksanaan strategi yang telah di putuskan oleh suatu organisasi. Ketidakberhasilan strategi menuju tujuan organisasi yang disebabkan akan kesalahan-kesalahan pada asumsi yang digunakan pada perumusan strategi. Campbell et.al. dalam Taufiqurokhman (2016), menganalisis sedikitnya ada tiga alasan mengapa suatu strategi dapat gagal dalam mengantar suatu organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Tiga hal tersebut yaitu, Strategi tanpa arah, kegagalan

membedakan antara apa yang akan dilakukan organisasi dan apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Organisasi yang gagal memahami kekuatan yang dimilikinya dan salah membaca sebagai maksud solusi, akan cenderung terlempar dari arena persaingan.

Kelumpuhan perencanaan, kendala akan memastikan langkah awal untuk bergerak (dari strategi atau tujuan?) diakibatkan terjadinya rencana yang “lumpuh” akibat kebingungan terhadap kelibatan proses dalam penyusunan suatu strategi. Memastikan tujuan dan kemudian membangun strategi untuk mencapai ataukah meniru strategi yang telah pasti berhasil dan kemudian memastikan tujuan yang dapat atau ingin dicapai berdasarkan strategi tersebut.

Terlalu fokus pada proses, seringkali manajer berharap untuk agar membangun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya keberhasilan sering kali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih kepada kesanggupan manajer untuk memahami dua hal mendasar yaitu, keuntungan atas yang dimilikinya maksud yang stabil dan terartikulasi dengan baik, serta pentingnya penemuan, pemahaman, pendokumentasian, dan eksploitasi informasi-informasi penting tentang bagaimana menciptakan nilai lebih banyak dibanding organisasi lain.

### **C. Pengelolaan Terumbu Karang**

Aktivitas manusia, baik di daratan maupun dilautan, merupakan faktor utama yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Sumbangan

kerusakan dapat berupa kerusakan langsung dan kerusakan tidak langsung. Aktivitas yang menyumbang kerusakan langsung, seperti penangkapan ikan dengan peledak atau bahan kimia dan pengambilan batu karang. Sedangkan aktivitas yang menyumbang kerusakan tidak langsung seperti pembabatan hutan, pembuangan bahan pencemaran ke sungai atau ke pantai, konsumsi tidak terkendali biota-biota yang dilindungi dan sebagainya. Karena pengelolaan ekosistem terumbu karang adalah untuk kepentingan manusia, maka faktor-faktor penghambat terkait kepentingan tersebut harus dipertimbangkan.

Sumber dari Ghufron (2010), kerusakan dan kepunahan ekosistem terumbu karang akan berdampak pada ekosistem lainnya, dan dampak terbesarnya adalah pada kehidupan manusia. Terumbu karang menyuplai pangan dan obat-obatan yang cukup besar untuk umat manusia. Terumbu karang juga merupakan salah satu tempat rekreasi dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Burke et.al (2012), terumbu karang adalah struktur fisik yang terbentuk oleh kegiatan banyak hewan kecil yang hidup dalam koloni besar dan membentuk kerangka kapur bersama-sama, Selama ribuan tahun, gabungan massa kerangka kapur tersebut membentuk terumbu besar, yang sebagian diantaranya tampak dari angkasa. ada sekitar 800 spesies karang pembentuk terumbu, yang mengharuskan syarat yang sulit, yakni membutuhkan perairan yang bersih, tembus cahaya, dan hangat. Hewan karang yang tumbuh sendiri, yang dikenal dengan polip, memiliki tubuh seperti tabung dan mulut yang berada ditengah yang dikelilingi oleh tentakel penyengat, yang dapat menangkap makanan. Didalam jaringan tubuh polip, hidup mikroalga (*zooxanthellae*) yang membutuhkan cahaya

matahari agar tetap hidup. Alga ini mengubah cahaya matahari menjadi zat gula (*glukosa*), yang menghasilkan tenaga untuk membantu kehidupan inang karangnya. Alga ini juga memberikan warna cerah pada karang.

Pendekatan strategi dalam pengelolaan terumbu karang menurut Sukmara (2001), adalah sebagai berikut:

### **1. Strategi KKP (Kawasan Konservasi Perairan)**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) diadakan dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, pengadaaan KKP ini dilaksanakan dengan mendistribusikan sebagian srea pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan ekosistem yang sehat. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan area berlindung dan berkembang-biak untuk sumber daya ikan guna menjamin kelestarian dan kegunaannya secara berkelanjutan. Bila hal tersebut direncanakan dan dikelola dengan tepat, KKP dapat memberikan kegunaan ekonomi unntuk masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, banyak pihak dan negara yang melakukan KKP guna mendukung pelestarian dan kegunaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 16,45 juta hektar kawasan konservasi perairan dari target 20 juta hektar pada tahun 2020. Kawasan konservasi perairan tersebut terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Kawasan Konservasi

Perairan Daerah (KKPD). Kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan ditetapkan memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar dan potensial sebagai sumber perekonomian masyarakat pesisir dikawasan konservasi.

Kawasan konservasi perairan adalah sesuatu yang diusahakan untuk melindungi ekosistem yang akan dilaksanakan untuk semua ekosistem berdasarkan kriteria sosial, budaya, ekonomi maupun ekologis. Pada umumnya konservasi telah menjadi syarat dan kepentingan yang harus dipenuhi sebagai penyeleasan atas kebutuhan ekonomi masyarakat serta harapan untuk terus menjaga sumber daya yang ada bagi masa depan Hajifu (2011).

KKP adalah salah satu sarana pengelolaan yang paling banyak digunakan dalam konservasi terumbu karang. Secara sederhana, KKP didefinisikan sebagai kawasan laut yang dikelola secara aktif untuk konservasi. Definisi tersebut luas dan meliputi berbagai tatanan pengelolaan yang memungkinkan, dengan berbagai macam cara dan kewenangan pengelolaan. pada suatu sisi, KKP mencakup tempat dengan hanya sedikit pembatasan penangkapan ikan atau kegiatan lain yang berkemungkinan membahayakan, dan bergantung pada pelaksanaan aturan halayak setempat. Disisi lain, KKP mencakup juga tempat dengan perlindungan menyeluruh berdasarkan landasan hukum ketat yang dipakai secara resmi dengan mengarah pada banyak kegiatan seperti berperahu wisata, memancing, pencemaran dan pembangunan pesisir Hidayati (2014).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi bahwa Kawasan Konservasi Perairan merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem yang dapat

dilakukan terhadap semua tipe ekosistem berdasarkan kriteria ekologis, sosial budaya dan ekonomis. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan.

Kewenangan pengelolaan KKP dapat diperoleh dari pemerintah pusat atau daerah, dan dapat meliputi beragam tingkat keikutsertaan masyarakat setempat dan pemberdayaan masyarakat. KKP berharga untuk penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kawasan tersebut. Jika batas KKP meluas sampai ke kawasan daratan yang berdekatan, maka dapat menyediakan manfaat tambahan, misalnya membatasi pembangunan pesisir atau jenis pemanfaatan lain yang merusak. bahkan kawasan yang kurang penegakan peraturannya menjadi dasar dilakukan pengelolaan masa depan yang lebih efektif.

Keadaan paling efektif, KKP mampu mempertahankan terumbu karang yang sehat bahkan apabila daerah yang mungkin telah dilakukan penangkapan berlebih atau yang terkena ancaman lain, dan KKP membangun kelompok terumbu karang yang ulet sehingga dapat pulih lebih cepat dari pada daerah yang tidak dilindungi dari beragam ancaman, termasuk penyakit dan pemutihan karang. Membangun KKP dalam jaringan merupakan strategi penting untuk memantapkan keuletan terumbu karang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.

Jaringan KKP terdiri dari KKP yang dibangun ditempat strategi untuk meningkatkan manfaat dari keterkaitannya (misalnya penyebaran larva antar daerah), melindungi daerah genting seperti daerah pemijahan ikan, meniru perlindungan jenis habitat, dan mendukung berbagai pendekatan pengelolaan.

Tentu saja terumbu karang di KKP bukan berarti kebal terhadap dampak. dalam banyak hal, KKP hanya memungkinkan pengurangan dampak yang sepadan dan kerusakan terumbu karang didalam KKP masih menjadi masalah besar.

## **2. Strategi Transplantasi Terumbu Karang**

Transpalantasi karang merupakan teknik memperbanyak koloni karang dengan menggunakan serta menghasilkan kolonial karang secara fegmentasi Subhan (2014). Berbagai kalangan dapat ikut serta dalam memelihara dan mengerjakan rehabilitas karang dengan metode ini. Namun saat ini cara yang diusahakan masih banyak yang mengangkat cara untuk perdagangan karang hias untuk rehabilitas. Cara dengan batu dan memantau terhadap alga merupakan rahasia keberhasilan dalam transpalantasi karang. Pemeriksaan benih-benih karang yang bagus dan kukuh terhadap alga serta masalah menjadi cara berharga dalam meningkatkan kesuksesan transpalantasi karang.

Transpalantasi karang adalah cara untuk melimpahkan koloni karang dengan menggunakan hasil aseksual karang secara fegmentasi. Para ahli sering juga memanfaatkan makna propagasi untuk kata lain dari transpalantasi karang. Metode transpalantasi karang merupakan cara sederhana untuk memperbaiki terumbu karang, berbagai kalangan masyarakat dapat ikut serta dalam melestarikan dan merehabilitas karang dengan cara tersebut.

Metode yang dilakukan saat ini masih menggunakan cara untuk perdagangan karang hias tidak untuk rehabilitasi. Setiap tempat terumbu karang yang mengalami kerusakan memiliki keistimewaan tersendiri. Transpalantasi karang merupakan kegiatan jangka panjang sehingga tidak bisa berbasis proyek.

Sistem program merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan keberhasilan transpalantasi karang dalam rangka rehabilitasi karang. Tranpalantasi membutuhkan informasi sifat fisika dan kimia perairan, informasi mendetail tentang faktor biologi di lokasi transpalantasi sangat dibutuhkan. Informasi tentang kompetitor dan predator serta penyakit karang perlu diperhatikan dengan seksama Subhan (2014).

### **3. Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat**

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat merupakan pengelolaan secara bersama antara masyarakat, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat yang bekerjasama untuk melestarikan kawasan terumbu karang yang telah ditetapkan atau disepakati bersama Sukmara et.al (2001). Tujuan dari pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat ini ialah agar dapat memelihara dan memperhatikan area ekosistem atau habitat-habitat yang dapat dipelihara dan dijaga dari aktivitas-aktivitas oknum yang merusak.

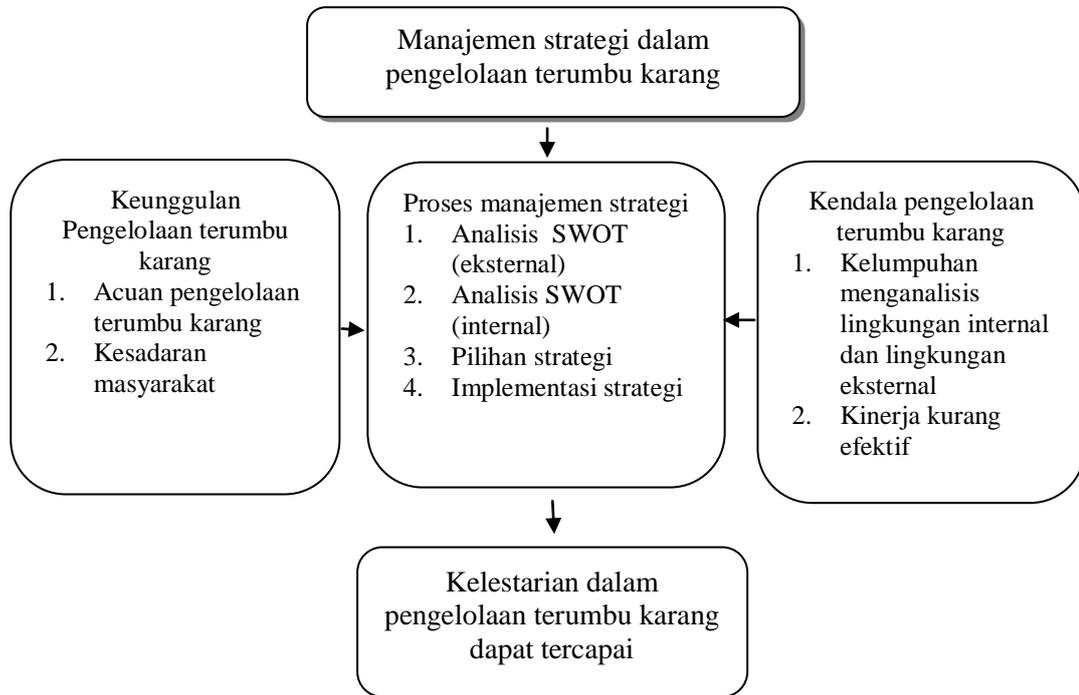
Melalui pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat maka dapat diperoleh perikanan di sekitar area terumbu karang yang dikelola atau dipelihara dan dikelola dapat terjamin dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Terumbu karang dipelihara oleh masyarakat dapat juga dijadikan sebagai lokasi pendidikan dan penelitian keanekaragaman hayati ekosistem dan habitat bagi institusi pendidikan. Serta dikembangkan sebagai lokasi parawisata ramah lingkungan (ekowisata) yang dapat memberikan kesempatan usaha wisata berbasis masyarakat.

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat juga memberikan kewajiban serta penetapan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk melestarikan terumbu karang dan sumber daya pesisir dan laut yang ada disekitar mereka. Agar masyarakat dapat memahami secara jelas mengenai kondisi terumbu karang yang ada dilokasi tersebut, mereka juga perlu diberikan pelatihan untuk melaksanakan pemantauan sendiri. Setelah melihat keadaan terumbu karang tersebut, maka harapan agar dapat timbul rasa kepedulian masyarakat lebih meningkat untuk melestarikannya. Masyarakat dapat melakukan cara-cara apa saja untuk dilakukan agar dapat melestarikan terumbu karang.

#### **D. Kerangka Pikir**

Penelitian akan selalu menggunakan kerangka pikir untuk menentukan alur dalam menentukan arah penelitian. Penelitian manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Wakatobi ini berfokus pada proses manajemen starategi yang meliputi sebagai berikut: (1). Analisis SWOT (internal), (2.) Analisis SWOT (eksternal), (3). Pilihan strategi , (4). Implementasi strategi,(5). Keunggulan pengelolaan terumbu karang, dan (6). kendala pengelolaan terumbu karang.

Gambar.1.1. Bagan Kerangka Pikir



### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis pada proses manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Pendekatan proses manajemen strategi meliputi: (1). Analisis SWOT (eksternal), (2.) Analisis SWOT (internal) (3). Pilihan Strategi, (4). Implementasi strategi, (5). Keunggulan pengelolaan terumbu karang, dan (6). Kendala pengelolaan terumbu karang.

### F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Analisis SWOT (internal) dalam pengelolaan terumbu karang (a). Analisis kekuatan lingkungan internal, (b.) analisis kelemahan lingkungan internal.

2. Analisis SWOT (eksternal) dalam pengelolaan terumbu karang meliputi: (a). Analisis peluang lingkungan eksternal (b.) Analisis ancaman lingkungan eksternal
3. Pilihan strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi meliputi: (a). Terumbu karang sehat berdaya guna, (b.) Menjaga Kelestarian terumbu karang (c) Daerah Perlindungan Laut.
4. Implementasi strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yang meliputi: (a). Pengawasan Pemerintah, (b). Kualitas SDM.
5. Acuan untuk pengelolaan terumbu karang selanjutnya merupakan langkah yang akan menjadi pedoman atau rujukan awal mengenai pengelolaan terumbu karang yang akan mendatang.
6. Adanya Kesadaran masyarakat dalam melestarikan terumbu karang merupakan pemahaman masyarakat untuk melestarikan terumbu karang dengan semestinya.
7. Kelumpuhan dalam menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang merupakan hal yang kurang diperhatikan secara mendalam mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang.
8. Kinerja kurang efektif dalam pengelolaan terumbu karang merupakan hasil pelaksanaan pengelolaan terumbu karang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
9. Kelestarian dalam pengelolaan terumbu karang merupakan pencapaian keadaan lingkungan ekosistem terumbu karang seperti semula.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan pada tanggal 28 Februari 2018 setelah seminar proposal sampai selesai. Dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas kelautan dan perikanan serta lingkungan masyarakat pesisir di Kabupaten Wakatobi. Tujuan penelitian ini dilakukan karena kondisi terumbu karang di Wakatobi yang kritis dikarenakan beberapa faktor salah satunya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak, serta racuan sianida.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah melalui penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan serta sifat-sifat seseorang yang harus diamati. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dihasilkan bukan berupa angka-angka tetapi data tersebut adalah berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini ialah mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi, maupun

individu). Artinya suatu kesatuan dalam mekanisme penelitian yang dilakukan dengan menganalisis secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas dan proses yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer ini merupakan sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif yang berupa kata-kata dan perilaku para informan pada saat di wawancarai peneliti mengenai pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Kata-kata dan perilaku merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati dan mewawancarai.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung tetapi ada penelitian sebelumnya, seperti dokumen, buku-buku laporan, peraturan-peraturan pemerintah, dan data yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

### **D. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang digunakan untuk memberi informasi tentang suatu kondisi dan keadaan latar penelitian Sebelum peneliti melakukan

pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi sosial penelitian, yang merupakan tempat dimana permasalahan yang terjadi betul-betul ada. Untuk menghasilkan informasi yang benar, peneliti memilih informan secara *porposive sampling*, dimana peneliti melakukan pemilihan informan dengan tidak acak atau secara sengaja mengambil informan tersebut. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang telah terpilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dalam fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dengan menggunakan teknik secara *purposive sampling*, dimana sebelumnya telah ditetapkan informan yang akan diwawancarai. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar informan Penelitian.

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Oktawinus	OW	Kepala dinas kelautan dan perikanan	1 orang
2.	Hardin, Samsinar, lisdawati	HR,SM, dan LS	Staf dinas kelautan dan perikanan	3 orang
3.	Wa ode aliana	WD	Anggota LSM	1 orang
4.	Muliadi, saidu, sayudi	MD,SD, SY	Masyarakat pesisir	3 orang
Jumlah				8

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan terumbu karang sebagai teknik pengumpulan data. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan para informan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **2. Dokumentasi**

Studi dokumentasi dalam penelitian ini, dilaksanakan melalui rekaman aktivitas, yaitu dengan cara melihat-lihat hal penting selama penelitian berlangsung. Rekaman tersebut berupa foto untuk memperoleh *gambaran* visual kegiatan pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang.

### **3. Observasi**

Observasi dalam penelitian ini adalah melihat perilaku masyarakat Kabupaten Wakatobi, proses kinerja pemerintah Kabupaten Wakatobi dan gejala-gejala alam yang terjadi di Kabupaten Wakatobi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014). Ketiga komponen tersebut yaitu:

### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya telah menumpk. oleh sebab itu, seharusnya secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti berada dilokasi, maka kuantitas data semakin banyak, kompleks, selain itu perlu secepatnya dilakukan analisis data menggunakan reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memisahkan hal-hal yang penting, memfokuskan padahal-hal yang pokok, dicari topik dan model dan membuang yang tidak perlu.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data yaitu teknik analisis data yang biasa dilaksanakan dalam berbagai deskriptif singkat, rancangan, serta hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### **c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi**

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan pertama yang dijelaskan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak didapatkan bukti-bukti jelas, yang dapat membantu dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dijelaskan pada tahap pertama, dapat mendukung kembalnya bukti-bukti yang ada dan tetap sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dilokasi penelitian. Maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

## **G. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang kredibel yang berhubungan dengan fenomena judul tersebut. Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Menurut sugiyono (2014) ada tiga macam triangulasi yaitu:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber digunakan dengan cara memeriksa kembali data yang telah di peroleh melalui berbagai sumber. Untuk itu peneliti melakukan pengambilan dan pemeriksaan data yang telah didapatkan melalui hasil pengamatan, wawancara, dan pengujian data. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik yaitu teknik dilakukan dengan cara melihat kembali data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan dengan wawancara, kemudian diperiksa kembali dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga cara pemeriksaaan kebenaran data tersebut, memperoleh data yang berlainan, maka peneliti menyelenggarakan diskusi mendalam ke pada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk menguatkan data mana yang dianggap benar atau mungkin saja semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### **3. Triangulasi Waktu**

Waktu juga dapat mempengaruhi kebenaran data. data yang diperoleh dengan cara wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, dapat menyampaikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rencana memeriksa kredibilitas data dengan melakukan pemeriksaan data dengan wawancara, observasi atau cara lain, dalam keadaan atau situasi yang tidak sama. Bila pemeriksaan menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang kali sehingga sampai menemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara memeriksa hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi kewenangan melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Wakatobi**

Kabupaten Wakatobi dulunya lebih dikenal sebagai kepulauan tukang besi sebelum menjadi daerah otonom. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada dibawah kekuasaan kesultanan Buton. Setelah Indonesia merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pertamakali terbentuk Wakatobi hanya berdiri dari lima kecamatan yaitu kecamatan wangi-wangi, kecamatan wangi-wangi selatan, kecamatan kaledupa, kecamatan tomia, dan kecamatan binongko. Namun sekarang Kabuapten Wakatobi sudah mengalami perkebangan dimana Kabupaten Wakatobi sudah berdiri 8 Kematan yaitu, Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi berjumlah 92,995 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 44.640 jiwa dan perempuan 48.355 jiwa.

Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu kabupaten yang 97% adalah lautan dan 3% adalah daratan/pulau yang berada dijazirah Sulawesi. Wilayah kabupaten Wakatobi dalam peta masuk dalam zona *wallacey* yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati baik dilaut maupun didarat. Kabupaten Wakatobi memiliki wisata taman nasional, dimana taman ini merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 1996 dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang, yang menempati salah satu prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.

## **2. Kondisi Geografi**

Kabupaten Wakatobi terletak dibagian tenggara pulau Sulawesi atau dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara  $5.000^0 - 6.25^0$  Lintang Selatan ( sepanjang  $\pm 160$  km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara  $123.34^0 - 124.64^0$  (sepanjang  $\pm 120$  km). Adapun batas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Buton dan Buton Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan perairan Laut Kabupaten Buton.

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar  $19.200 \text{ km}^2$ , terdiri dari daratan seluas  $\pm 823 \text{ km}^2$  atau sebesar 97 % dari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah

kecamatan, 75 Desa dan 25 Kelurahan. Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wangi-wangi dengan luas 241 km<sup>2</sup> (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah Ibukota Kabupaten, sedangkan Kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km<sup>2</sup> (5,53%). Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Wangi-wangi, Wangi-wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, Togo Binongko.

Jumlah penduduknya sekitar 103.247 jiwa yang tersebar pada 8 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, hanya ada dua etnik terbesar yang mendiami kawasan ini, yaitu suku Buton (sebagai nelayan dan petani), dan suku Bajo (manusia laut). Wakatobi terletak pada pusat Segi Tiga karang dunia (*Coral Triangle Center*), memiliki jumlah keaneka ragaman hayati kelautan tertinggi didunia yakni 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia.

### **3. Visi dan Misi Kabupaten Wakatobi**

#### **a. Visi Kabupaten Wakatobi**

Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengimbau kepada seluruh SKPD agar bekerjasama menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten maritim berdaya saing. Sumber daya yang memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat Wakatobi berada dilaut. Hal tersebut tercantum dalam visi Kabupaten Wakatobi yaitu: "Wakatobi Menjadi Kabupaten Maritim yang Sejahtera dan Berdaya Saing".

### **b. Misi Kabupaten Wakatobi**

Berdasarkan visi yang dikembangkan tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi yang berbasis kemaritiman dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mengembangkan sosial budaya, industry kreatif dan pariwisata;
4. Mengembangkan pembengunan infrastruktur dasar;
5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Mendorong pemerintah yang inovatif dan partisipatif;
7. Membangun kolaborasi internasional.

### **4. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu: melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**5. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi**

**a. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi**

Kabupaten Wakatobi memiliki potensi kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari yang menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara. Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi memiliki visi yaitu: “Terwujudnya kawasan perikanan lestari dan sejahtera”.

**b. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi**

Implementasi dari visi tersebut ditujukan melalui beberapa misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas dan kualitas dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang dimiliki secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan nelayan dan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
3. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian keanekaragaman sumber daya perikanan yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, permodalan, dan pemasaran usaha perikanan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan.
6. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

## **B. Proses Manajemen Strategi dalam Pengelolaan Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi**

Proses manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam manajemen strategi. Strategi pengelolaan terumbu karang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi. Khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Untuk mengidentifikasi manajemen strategi pengelolaan terumbu karang peneliti akan menjelaskan beberapa indikator dari proses manajemen strategi yakni meliputi: (1.) Analisis SWOT (eksternal), seperti, (a.) analisis peluang lingkungan eksternal, dan (b.) analisis ancaman lingkungan eksternal, (2.) Analisis SWOT (internal), seperti, (a.) analisis kekuatan lingkungan internal dan (b). analisis kelemahan lingkungan internal (3.) Pilihan Strategi seperti, (a.) Terumbu karang sehat dan berdaya guna, (b.) Menjaga kelestarian terumbu karang , (c.) Daerah perlindungan laut (4.) Implementasi Strategi seperti. (a.) Pengawasan pemerintah, (b.) Kualitas SDM.

### **1. Analisis SWOT (eksternal)**

Analisis SWOT (eksternal) ini penting untuk dilakukan dalam mendeteksi peluang yang dimiliki dan ancaman yang ada di lingkungan internal pengelolaan terumbu karang. Di dalam analisis lingkungan internal berupaya memilah peluang dan ancaman yang dihadapi. Selain analisis lingkungan eksternal ini perlu dilakukan, karena dalam rangka pencapaian tujuan, berbagai sasaran dan dalam

mengembangkan misi, tidak dielakkan lagi interaksi strategi akan bersangkutan dengan lingkungan eksternal. Pada tahap ini sangat penting karena merupakan dasar untuk analisis selanjutnya. Adapun analisis lingkungan eksternal yaitu, (a.) analisis peluang lingkungan eksternal, dan (b.) analisis ancaman lingkungan internal.

### **1.1. Analisis Peluang Lingkungan Eksternal**

Analisis peluang lingkungan eksternal merupakan kondisi lingkungan eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan pengelolaan terumbu karang. Peluang lingkungan eksternal tak lain faktor-faktor yang menyediakan kesempatan untuk merealisasikan rencana-rencana dalam pengelolaan terumbu karang dengan lebih lancar. Berikut pernyataan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

“...Setelah selesai menganalisis lingkungan internal selanjutnya kami membahas mengenai analisis lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang. menganalisis peluang lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang kami juga melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang kami anggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang (LSM, tokoh adat, serta staf-staf pemerintah) dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan hasil analisis yang mereka miliki. Diskusi ini akan melahirkan isu-isu mengenai kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang.”(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Sesuai hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui mengenai isu-isu kelemahan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang pemerintah Kabupaten Wakatobi juga melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang untuk mendapatkan isu-isu strategis mengenai peluang lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan SM salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya

“...Untuk menganalisis peluang lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang di Wakatobi itu dilihat dari aspek sosial seperti adanya perhatian tokoh adat dan pemuda dalam upaya pengelolaan terumbu karang, adanya pedoman dan dukungan pemerintah pusat untuk pembentukan kawasan konservasi perairan serta adanya peranan perguruan tinggi yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan terumbu karang”. (Hasil wawancara dengan SM 06 Maret 2018 pukul 10.00 wita).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peluang lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dapat dilihat dari aspek sosial seperti perhatian tokoh adat dan pemuda dalam upaya pengelolaan terumbu karang. Peran tokoh adat dan pemuda dalam pengelolaan terumbu karang sangat mendukung karena mereka merupakan orang yang dihormati dalam lingkungan masyarakat. Senada dengan pernyataan HR salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Saya kira perhatian tokoh adat dan pemuda merupakan peluang lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dan sangat mendukung. Karena tokoh adat dapat melestarikan terumbu karang melalui kearifan lokal dan hukum adat”.(Hasil Wawancara HR 30 Februari 2018).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang lingkungan eksternal yang memiliki pengaruh bagi pengelolaan terumbu karang adalah peran tokoh adat dan pemuda di Kabupaten Wakatobi. Mereka dapat membantu melestarikan sumber daya terumbu karang melalui kearifan lokal serta hukum adat dapat diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya terumbu karang serta dapat memberikan arah yang bagus dalam pengelolaan terumbu karang.

Kemudian dilakukan wawancara dengan WD selaku anggota LSM Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Dalam menentukan faktor peluang eksternal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi itu dapat dilihat dari kondisi ekonomi, seperti pelatihan pengelolaan biota yang bernilai ekonomis, serta Wakatobi sebagai daerah suaka pesisir bank benih ikan untuk meningkatkan hasil tangkap”.(Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018).

Sesuai data tersebut dapat disimpulkan bahwa menganalisis peluang eksternal pengelolaan terumbu karang juga dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi seperti pelatihan pengelolaan biota bernilai ekonomis dimana Kabupaten Wakatobi memiliki biota-biota yang bernilai ekomis yang dapat dimanfaatkan dengan baik serta dengan dilestarikannya terumbu karang akan menjadikan daerah laut Kabupaten Wakatobi menjadi bank benih ikan. Senada dengan pernyataan dari SY yang menyatakan bahwa:

“...Pelatihan pengelolaan biota bernilai ekomis ini merupakan peluang lingkungan eksternal yang baik dalam pengelolaan terumbu karang karena selain dapat memberikan pemahaman akan biota-biota bernilai ekonomis bagi kami masyarakat serta dapat memberikan panduan terkait harga-harga pasar yang menguntungkan masyarakat”.(Hasil Wawancara SY 04 Maret 2018).

Peluang eksternal ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengelolaan terumbu karang. Adapun faktor-faktor peluang lingkungan eksternal sesuai data diatas yaitu, (1.) Adanya perhatian tokoh adat dan pemuda dalam upaya pengelolaan terumbu karang, (2.) Adanya pedoman dan dukungan pemerintah pusat untuk pembentukan kawasan konservasi perairan, (3.) Adanya peranan perguruan tinggi yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan terumbu karang, (4.) Pelatihan pengelolaan biota yang bernilai ekonomis, (5.) Wakatobi

sebagai daerah suaka pesisir bank benih ikan untuk meningkatkan hasil tangkap. Analisis peluang eksternal pengelolaan terumbu karang di Wakatobi belum efektif. Dikatakan belum efektif karena pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi karena dalam menyusun peluang eksternalnya masih kurang koordinasi mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang.

### **1.2. Analisis Ancaman Lingkungan Eksternal**

Analisis ancaman lingkungan eksternal merupakan kondisi lingkungan eksternal yang menghambat keberhasilan pengelolaan terumbu karang. Ancaman lingkungan eksternal ini merupakan hal yang dapat melemahkan atau mengganggu pengelolaan terumbu karang. Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa faktor ancaman eksternal dalam pengelolaan terumbu karang. Berikut hasil wawancara dengan OW selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Wakatobi.

“...Sama halnya dengan menganalisis peluang lingkungan eksternal tadi untuk menganalisis peluang lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang kami juga melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang kami anggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan hasil analisis yang mereka miliki. Diskusi ini akan melahirkan isu-isu mengenai kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang.”(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui mengenai isu-isu peluang lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang pemerintah Kabupaten Wakatobi juga melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang untuk mendapatkan isu-isu strategis mengenai peluang

lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan LS salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Aspek analisis ancaman eksternal lingkungan pengelolaan terumbu karang ini dapat dilihat juga dari kondisi sosial seperti, adanya ancaman konflik kepentingan dalam pemanfaatan terumbu karang, eksploitasi terumbu karang secara berlebihan untuk tujuan pribadi serta kurang kesadaran untuk mengelola terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan LS 06 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman lingkungan internal pengelolaan terumbu karang hanya dikategorikan pada kondisi sosial saja seperti adanya ancaman konflik kepentingan dalam pemanfaatan terumbu karang. Ancaman konflik kepentingan ini dapat menghambat pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yang mengakibatkan ancaman konflik kepentingan ini terjadi karena sifat-sifat egois yang dimiliki manusia. Senada dengan pernyataan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Konflik kepentingan pernah terjadi di Tomia dimana pada waktu itu salah satu *Molerens riset* disana memiliki proyek sendiri dimana diibaratkan mereka memiliki lokasi konservasi sendiri dalam melestarikan sumber daya. Karena mereka berfikir telah melestarikan beberapa tahun terakhir. Mereka tidak memperbolehkan atau melarang operator *dive* dari luar Tomia menyelam dilokasi tersebut”.(Hasil Wawancara OW 30 Februari 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu ancaman lingkungan eksternal yang disebabkan konflik kepentingan tersebut akan mengakibatkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat sehingga bisa saja masyarakat melakukan tindakan-tindakan penangkapan ikan yang dapat merusak terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa

konflik kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang dapat menghambat pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

Peneliti belum puas dengan hasil tersebut. Maka peneliti melakukan wawancara dengan WD salah satu anggota LSM Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya.

“...Menurut saya ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan terumbu karang yaitu, munculnya nelayan diluar daerah yang beroperasi di perairan Kabupaten Wakatobi karena mendapatkan legitimasi dari oknum tertentu”. (Hasil Wawancara dengan WD 04 Maret 2018 pukul 11.00 wita).

Menurut hasil wawancara diatas dapat diangkat kesimpulan bahwa ancaman lingkungan eksternal lain adalah munculnya nelayan diluar daerah yang beroperasi di perairan Kabupaten Wakatobi yang mendapat legitimasi dari oknum tertentu ini akan menyebabkan perasaan yang tidak adil oleh masyarakat nelayan Kabupaten Wakatobi yang bisa membuat mereka berbuat sesuatu yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

Selanjutnya tanggapan SD salah satu Masyarakat pesisir ketika dilakukan sesi wawancara dengan masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...kalau ancaman lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi adalah penangkapan ikan yang merusak lingkungan itu tidak dapat dipungkiri masih saja terjadi. namun menurut saya sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 lalu bisa dikatakan masih marak-maraknya pemboman ikan yang dilakukan masyarakat nelayan”.(Hasil Wawancara SD 05 Maret 2018).

Hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman eksternal pengelolaan terumbu karang bukan hanya dilihat dari aspek sosial tetapi juga bisa dilihat dari aspek politik, ancaman pengelolaan terumbu karang tidak hanya dilihat dari satu

sisi saja tetapi harus dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun ancaman eksternal pengelolaan terumbu karang terdiri dari beberapa faktor yaitu, (1.) Adanya ancaman konflik kepentingan dalam pemanfaatan terumbu karang, (2.) Eksploitasi terumbu karang secara berlebihan untuk tujuan pribadi, (3.) Kurang kesadaran untuk mengelola terumbu karang, (4.) Adanya nelayan diluar daerah yang beroperasi di perairan Wakatobi (5.) Penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ancaman eksternal bukan hanya pada aspek sosial tetapi juga aspek politik. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa masih saja terjadi penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan laut Kabupaten Wakatobi. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi lagi perairan Kabupaten Wakatobi dari pihak-pihak yang bisa menghambat pengelolaan terumbu karang serta pemerintah diharapkan bisa melibatkan lembaga-lembaga yang dianggap bisa ikut serta dalam pengelolaan terumbu karang serta masyarakat pesisir.

Keseluruhan hasil penelitian mengenai Analisis SWOT diatas, peneliti menemukan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Dari hasil penelitian melalui Analisis SWOT, peneliti ingin mengemukakan secara rinci melalui tabel matriks antara lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta strategi-strategi yang telah ditawarkan oleh peneliti tersebut. Berikut matriks SWOT pengelolaan terumbu karang.

## **2. Analisis SWOT (internal)**

Analisis SWOT (internal) ini penting untuk dilakukan dalam mendeteksi kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal pengelolaan terumbu karang. Di dalam analisis lingkungan internal berupaya memilah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi. Selain analisis internal ini perlu dilakukan, karena dalam rangka pencapaian tujuan, berbagai sasaran dalam mengembangkan misi, tidak dielakkan lagi interaksi strategi akan bersangkutan dengan lingkungan internal. Pada tahap ini sangat penting karena merupakan dasar untuk analisis selanjutnya. Adapun analisis lingkungan internal yaitu, (a.) analisis kekuatan lingkungan internal, dan (b.) analisis kelemahan lingkungan internal.

### **2.1. Analisis Kekuatan Lingkungan Internal**

Kekuatan lingkungan internal merupakan keseluruhan upaya menciptakan profil organisasi bukan tugas yang mudah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melalui analisis SWOT, melalui analisis ini akan diketahui secara jelas dan pasti faktor-faktor lingkungan internal yang menjadi kekuatan strategi pengelolaan terumbu karang yang mencakup kemampuan yang dapat meminimalkan kelemahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, mengungkapkan bahwa:

“...Untuk menganalisis kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang kami melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang kami anggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang (LSM, tokoh adat, serta staf-staf pemerintah) dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan hasil analisis yang mereka miliki.

Diskusi ini akan melahirkan isu-isu mengenai kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang.”(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui mengenai isu-isu kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang pemerintah Kabupaten Wakatobi melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang untuk mendapatkan isu-isu strategis.

Kemudian dilakukan wawancara dengan LS salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya

“...Dalam menganalisis lingkungan kekuatan internal pengelolaan terumbu karang yang menjadi pendorong keberhasilan strategi pengelolaan terumbu karang kami melihat dari aspek kondisi sumber daya khususnya terumbu karang seperti, perairan Wakatobi memiliki hamparan terumbu karang yang indah, serta memiliki biota yang bernilai ekonomis, penting seperti ikan karang, lobster, kerang dll”. (Hasil wawancara dengan LS 06 Maret 2018).

Melihat hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, bahwa kekuatan internal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi itu dapat dilihat dari kondisi sumber daya khususnya terumbu karang yaitu Kabupaten Wakatobi memiliki hamparan yang indah bukankah ini merupakan salah satu obyek yang akan bermanfaat bagi Kabupaten Wakatobi. Lain halnya yang disampaikan oleh SM salah satu staf Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataan beliau:

“...Menganalisis kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang di Wakatobi dengan melihat melalui penegakan hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah seperti, dukungan dan kebijakan pemerintah daerah contohnya Perda No 5 tahun 2009 tentang pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut serta potensi sumber daya terutama

terumbu karang contohnya terumbu karang dijadikan sebagai wisata bawah laut”. (hasil wawancara dengan SM, 06 Maret 2018).

Hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang dilihat dari segi penegakan hukum. Penegakan hukum ini merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat penting dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi karena dengan adanya penegakan hukum tersebut dapat mencegah masyarakat untuk bertindak merugikan. Senada dengan pernyataan HR salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut Pernyataannya

“...Kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi itu yang penting adalah adanya dukungan pemerintah daerah maupun pusat mengenai pengelolaan terumbu karang karena peran pemerintah sangat penting. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah pihak yang menonjol dalam pengelolaan terumbu karang”.(Hasil Wawancara HR 30 Februari 2018).

Hasil wawancara diatas dengan HR dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dengan memberikan dukungan sangatlah penting. Hal ini bukan saja dilihat dari segi penegakan hukum tetapi juga pemerintah harus aktif mengajak masyarakat untuk mengelola terumbu karang.

Selanjutnya tanggapan dari MD salah satu masyarakat pesisir ketika dilakukan sesi wawancara dengan masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Kekuatan lingkungan internal dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi ini menurut saya dilihat dari keindahan terumbu karangnya. Keindahan inilah yang memotivasi kita untuk menjaga dan melestraikannya selain itu dengan keindahan ini perairan Kabupaten Wakatobi dijadikan sebagai wisata”.( Hasil Wawancara MD 05 Maret).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan internal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dapat dilihat dari keindahan terumbu karang yang dimilikinya. Keindahan inilah yang menjadikan perairan Kabupaten Wakatobi sebagai wisata serta merupakan aset daerah yang sangat penting untuk dijaga.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan internal dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Faktor kekuatan internal tersebut adalah, (1.) perairan Wakatobi masih memiliki hamparan terumbu karang yang indah, (2.) memiliki biota yang bernilai ekonomis penting seperti ikan karang, lobster, dll (3.) Dukungan dan kebijakan pemerintah daerah yang penting, serta (4.) Terumbu karang dijadikan sebagai wisata bawah laut. Namun, akan lebih baik jika pemerintah daerah Wakatobi lebih efektif lagi dalam menetapkan faktor kekuatan internal pengelolaan terumbu karang dengan mengidentifikasi informasi-informasi lebih mendalam dengan lembaga-lembaga yang bisa bertanggung jawab mengenai kekuatan internal pengelolaan terumbu karang karena sesuai pengamatan peneliti masih ada faktor kekuatan internal yang mendominasinya.

## **2.2. Analisis Kelemahan Lingkungan Internal**

Kelemahan merupakan kondisi internal yang menghambat keberhasilan dalam mencapai proses pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang. Pengamatan peneliti dilapangan menunjukan beberapa variabel pokok yang

mendominasi dalam mempengaruhi faktor kelemahan. Berikut hasil wawancara dengan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

“...Sama halnya dengan menganalisis kekuatan lingkungan internal tadi untuk menganalisis kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang kami juga melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang kami anggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang (LSM, tokoh adat, serta staf-staf pemerintah) dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan hasil analisis yang mereka miliki. Diskusi ini akan melahirkan isu-isu mengenai kekuatan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang.”(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Menurut hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui mengenai isu-isu kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang pemerintah Kabupaten Wakatobi juga melakukan forum diskusi dengan lembaga-lembaga yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang untuk mendapatkan isu-isu strategis mengenai kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang.

Selanjutnya tanggapan dari HR salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Untuk melihat kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang dapat dilihat dari kondisi masyarakat Wakatobi itu sendiri seperti, masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat terumbu karang serta tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pendapatan masih rendah”. (Hasil wawancara dengan HR 30 Februari 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang hanya dikategorikan pada kondisi masyarakat itu sendiri dimana masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat terumbu karang. Rendahnya pengetahuan masyarakat ini menjadi konsekuensi terhadap sumber daya pesisir seperti terumbu karang yang tidak bisa

dimanfaatkan secara optimal. Senada dengan pernyataan dari LS menyatakan bahwa:

“...Salah satu kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya kebanyakan dari mereka hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD. Inilah yang akan mengakibatkan pola pemanfaatan sumber daya terumbu karang tidak memperhatikan aspek-aspek kelestarian”.(Hasil Wawancara dengan LS 06 Maret 2018).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat merupakan kelemahan lingkungan internal yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatob. Masih kurangnya transfer pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat terkait pemanfaatan ekosistem terumbu karang.

Peneliti belum puas dengan hasil tersebut. Maka peneliti melakukan wawancara dengan WD salah satu anggota LSM Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya.

“...Sebelum menetapkan kelemahan internal pengelolaan terumbu karang. Pemerintah harus melakukan survei dengan baik di lapangan. Karena ada beberapa kelemahan yang menurut saya kurang diperhatikan oleh pemerintah seperti, masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan terumbu karang serta masih terbatasnya, tenaga pengawas, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan terumbu karang. Hal ini masih kurang diperhatikan pemerintah”. (Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018 pukul 11.10 wita).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Wakatobi harus lebih memperhatikan dalam menganalisis kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang karena ada beberapa faktor kelemahan

lingkungan internal yang kurang diperhatikan seperti masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini akan mengakibatkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang akan kurang efektif. Rendahnya pengawasan ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya tenaga aparat yang melakukan pengawasan. Senada dengan pernyataan SM yang menyatakan bahwa:

“...Saya kira pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan terumbu karang itu masih belum maksimal. Saya mengatakan begini karna dalam satu bulan itu kadang kita lakukan patroli cuman dua kali. Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasaran serta tenaga aparat yang melakukan pengawasan masih minim”.(Hasil Wawancara dengan SM 06 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kelemahan lingkungan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi terdiri beberapa faktor yaitu, (1.) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat terumbu karang, (2.)Tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pendapatan masyarakat masih rendah, (3.) Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan terumbu karang, (4.) terbatasnya tenaga pengawas, kurangnya sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kelemahan internal bukan hanya dilihat dari kondisi masyarakat tetapi pemerintah Kabupaten Wakatobi juga harus melihat kondisi aparat pemerintah. Karena peranan aparat pemerintah daerah sangatlah besar bahkan mendominasi dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.

Tabel.1.2. matriks analisis SWOT dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

<b>EKSTERNAL</b>  <b>INTERNAL</b>	<b>Opportunities(peluang):</b>	<b>Theareats (ancaman):</b>
		1. Adanya perhataian tokoh adat dan pemuda 2. Adanya pedoman dan dukungan pemerintah pusat. 3. Adanya peranan perguruan tinggi. 4. Pelatihan biota yang bernilai ekonomis 5. Wakatobi sebagai daerah suaka pesisir bank benih.
<b>Streght (kekuatan)</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
1. Peraiaran Wakatobi masih memiliki hamparan terumbu karang yang indah 2. Memiliki biota yang bernilai ekonomis 3. Memiliki dukungan dan kebijakan pemerintah daerah 4. Terumbu karang dijadikan sebagai wisata bawah laut.	Melakukan sosialisasi dan promosi mengenai kesehatan dan manfaat terumbu karang di daerah perlindungan laut pada semua kalanga. (O <sub>1</sub> ,O <sub>3</sub> ,S <sub>1</sub> ,S <sub>4</sub> ) Meningkatkan legitimasi dan peraturan mengenai pengelolaan terumbu karang. (O <sub>2</sub> ,S <sub>3</sub> ) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan biota ekonomis.(O <sub>4</sub> ,O <sub>5</sub> ,S <sub>4</sub> )	Mengadakan pembinaan kepada masyarakat mengenai kesehatan dan manfaat terumbu karang melalui kearifan lokal.(W <sub>1</sub> ,O <sub>2</sub> ) Melakukan pelatihan-pelatihan mengenai usaha-usaha dan budidaya perikanan. (W <sub>2</sub> ,O <sub>4</sub> ) Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pelatihan peningkatan SDM aparatur dan masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang di daerah perlindungan laut. (W <sub>4</sub> ,O <sub>2</sub> ).
<b>Weaknesses (kelemahan)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat. 2. Tingkat pendidikan masyarakat dan pendapatannya masih rendah 3. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hokum 4. Terbatasnya tenaga pengawas serta sarana dan prasarana	Melakukan sosialisasi mengenai zona daerah perlindungan laut kepada seluruh masyarakat serta menjaga kelestarian terumbu karang.(S <sub>1</sub> S <sub>4</sub> T <sub>1</sub> T <sub>4</sub> ) Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap eksploitasi terumbu karang secara berlebihan. (S <sub>3</sub> , T <sub>2</sub> ) Melakukan pembinaan kepada masyarakat (pengelolaan biota bernilai ekonomis dan peningkatan kesadaran terhadap kelestarian terumbu karang. (S <sub>2</sub> ,T <sub>3</sub> )	Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan manfaat terumbu karang serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan bersama daerah perlindungan laut. (W <sub>1</sub> ,W <sub>2</sub> ,T <sub>3</sub> ) Melakukan pengawasan secara rutin serta membentuk kelompok pengawas masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan pos pelayanan pengawasan di masing-masing daerah perlindungan laut. (W <sub>3</sub> ,W <sub>4</sub> ,T <sub>1</sub> ,T <sub>2</sub> ,T <sub>4</sub> ).

### 3. Pilihan Strategi

Tahapan analisis SWOT pertama tadi, pada akhirnya akan melangkah pada tahap selanjutnya yaitu pilihan strategi. Pilihan strategi ini adalah tahapan penentuan strategi yang akan digunakan dalam pengelolaan terumbu karang. Sebelum proses pemilihan strategi ini diputuskan oleh pengambilan keputusan. Peneliti akan menjelaskan beberapa indikator dari penetapan strategi yaitu, (a.) Terumbu karang sehat dan berdaya guna, (b.) menjaga kelestarian terumbu karang, (c.) Daerah perlindungan laut.

### **3.a. Terumbu Karang Sehat dan Berdaya Guna**

Terumbu karang sehat dan berdaya guna merupakan pengelolaan terumbu karang yang mementingkan kesehatan serta manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Terumbu karang sehat dan berdaya guna ini merupakan motto atau semboyan yang digunakan untuk mengelola terumbu karang. Motto merupakan kata yang dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menggambarkan motivasi, semangat, serta mentransfer kekuatan serta dukungan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam penetapan strategi yang dilakukan pemerintah Wakatobi tidak menggunakan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan pengelolaan terumbu karang tetapi pemerintah Wakatobi memiliki pandangan yang berbeda dengan menetapkan motto untuk mencapainya. Berikut hasil wawancara dengan staf HR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya.

“...Kami tidak menetapkan visi dan misi untuk proses perumusan strategi terkait kelestarian sumber daya alam ini khususnya terumbu karang. Tetapi kami hanya menetapkan seperti semboyan-semboyan dalam bahasa daerah contohnya: *“fatu sangga seha kene koruo”* (terumbu karang yang

sehat dan berdaya guna) karena akan lebih mudah dimengerti masyarakat disini.(wawancara HR, 05 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak menggunakan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan pengelolaan terumbu karang tetapi menggunakan motto agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengerti. Namun penetapan motto ini kurang efektif karena Visi dan Misi juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dan akan lebih baik jika ketiga indikator tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yakni SM menyatakan bahwa:

“...Sebelum menyusun rencana pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Memang perlu kita ketahui pandangan, arah serta cita-cita dan harapan masyarakat melalui pengelolaan terumbu karang ini. Harapan ini kami tuangkan dalam bentuk semboyan *“fatu sangnga seha kene koruo”* (Terumbu karang sehat dan berdaya guna) untuk pengelolaan terumbu karang”.(Hasil Wawancara SM 06 Maret 2018)

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai harapan serta cita-citanya pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan motto atau semboyan dalam strategi pengelolaan terumbu karang. Pemerintah tidak menetapkan Visi dan Misi untuk mencapai strategi pengelolaan terumbu karang. Pemerintah Kabupaten menganggap akan lebih optimal jika mereka menetapkan semboyan sebagai pengganti Visi dan Misi pengelolaan terumbu karang karena memudahkan masyarakatnya untuk memahami hal tersebut. Terumbu karang sehat dan berdaya guna merupakan motto atau semboyan yang digunakan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi ini

memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Seperti pernyataan dari WD yang merupakan salah satu anggota LSM Kabupaten Wakatobi berikut:

“...Penetapan terumbu karang sehat dan berdaya guna sebagai semboyan dalam pengelolaan terumbu karang ini memiliki makna tersendiri bagi kami. Dimana hal yang utama diperhatikan dalam mengelola terumbu karang ialah kesehatannya sehingga terumbu karang tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita kedepannya serta pengelolaan yang dilakukan dapat tercapai.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan terumbu karang sehat dan berdaya guna sebagai semboyan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi memiliki makna yang sangat penting. Terumbu karang sehat dan berdaya guna ini didasari untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat masyarakat untuk menjaga kesehatan terumbu karang sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah. Namun Terumbu karang sehat dan berdaya guna sebagai semboyan ini dapat sukses mencapai harapan yang diinginkan bukan hanya dijadikan sebagai slogan saja tetapi harus benar-benar ditanamkan dalam diri masyarakat Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya tanggapan dari OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

“...Agar selalu memperoleh terumbu karang yang sehat kami sebagai pemerintah selalu melakukan pemantauan dengan menyelam untuk melihat kondisi terumbu karang seperti kondisi lingkungan hidupnya yang bisa menyebabkan kesehatannya tidak baik. Pemantauan ini kami lakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kondisi terumbu karang yang sehat dapat dilihat dengan melimpahnya ikan area tersebut karena dengan perkembangan terumbu karang yang melimpah, ikan-ikan dapat menjadikannya sebagai tempat tinggal. Terumbu karang yang sehat ini juga dapat memberikan manfaat sebagai objek wisata.

Menurut hasil wawancara dengan OW selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu

karang yang sehat dan berdaya guna dapat dilihat dengan melimpahnya ikan-ikan yang ada di daerah tersebut. Untuk memelihara kondisi terumbu karang di Kabupaten Wakatobi agar selalu sehat dan terjaga pemerintah melakukan pemantauan dengan menyelam untuk melihat secara langsung kondisi terumbu karang di daerah pengelolaan terumbu karang. Terumbu karang yang sehat dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kabupaten Wakatobi.

Selanjutnya tanggapan dari SD salah satu warga pesisir ketika dilakukan sesi wawancara dengan masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Memang dalam penetapan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi tidak menggunakan visi dan misi namun dalam pemahaman saya penetapan semboyan dalam pengelolaan terumbu karang ini memiliki makna yang penting bagi kami masyarakat karena kalimat yang dipakai sebagai dasar tuntutan pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara SD 05 Maret 2018).

Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semboyan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi memiliki makna yang penting bagi masyarakat Kabupaten *Wakatobi* yang dapat memberikan semangat dalam pengelolaan terumbu karang karena bahasa kunci yang digunakannya. Senada dengan pernyataan dari MD yang menyatakan bahwa:

“...Bahasa kunci yang digunakan dalam penetapan semboyan pengelolaan terumbu karang memiliki makna yang penting dimana kata “*sangnga seha*” (Terumbu karang sehat) memiliki arti kondisi yang baik bagi kelestarian sumber daya. Kondisi yang diharapkan dalam pengelolaan terumbu karang dan dapat selalu diperhatikan oleh kami masyarakat serta kata “*kene koruo*” mengandung makna terumbu karang yang banyak serta melimpa harus”.(Hasil wawancara MD 05 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kata-kata kunci dalam penetapan semboyan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi

memiliki makna yang penting dimana setiap kata yang digunakan bersifat untuk memberitahukan sesuatu usaha bersama dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Kata-kata semboyan yang digunakan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dengan bahasa daerahnya ini dapat dengan cepat dipahami masyarakat Kabupaten Wakatobi.

### **3.b. Menjaga Kelestarian Terumbu Karang**

Menjaga kelestarian terumbu karang merupakan Tujuan dari pengelolaan terumbu karang serta merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi karena menjaga kelestarian terumbu karang adalah langkah yang pertama dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang agar terarah dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan OW selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataan

“...Selaras dengan semboyan yang kami tetapkan menjaga kelestarian terumbu karang adalah tujuan dari perumusan strategi pengelolaan terumbu karang. Makna dari “Menjaga kelestarian terumbu karang ini adalah dengan melindungi serta memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut seperti terumbu karang, ikan, tumbuhan serta organisme hidup lainnya sehingga dapat melimpah. penetapan tujuan ini dengan melakukan diskusi bersama staf-staf inti dari pengelolaan terumbu karang”.(wawancara dengan OW, 30 Februari 2018 pukul 13.10).

Hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa menjaga kelestarian terumbu karang merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan terumbu karang. Menjaga terumbu karang berarti melindungi sumber daya yang ada di Kabupaten Wakatobi. Penetapan tujuan ini dilakukan oleh staf-staf inti dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang terlibat langsung dalam perumusan pengelolaan terumbu karang. Namun akan lebih

maksimal jika penetapan tujuan ini, jika aparat pemerintah melakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk penggalian ide dan persetujuan tujuan pengelolaan terumbu karang bersama. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan SM salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

“...Menjaga kelestarian terumbu karang sebagai tujuan pengelolaan terumbu karang merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang karena arah yang akan kita tuju dengan menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjadi pedoman bagi kita. Agar langkah awal ini sesuai dengan tujuan tersebut, seharusnya masyarakat tidak menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang karena hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan SM 05 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara dengan SM yang merupakan salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi bahwa menjaga kelestarian terumbu karang merupakan langkah awal dan sebagai pedoman yang akan dituju dalam pengelolaan terumbu karang. Agar langkah awal tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, masyarakat diharapkan tidak menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan karena hal tersebut sudah berbanding terbalik dari tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan terumbu karang.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan HR salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Tujuan pembentukan pengelolaan ini dimana tidak lain adalah untuk menjaga terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat salah satunya

dengan melimpahnya biota-biota laut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir”.(Hasil wawancara HR 30 Februari 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan pengelolaan terumbu karang untuk menjaga dan memperbaiki sumber daya terutama terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Selain itu, dapat memberikan manfaat yang baik untuk para masyarakat nelayan Kabupaten Wakatobi dengan melimpahnya biota-biota laut. Mereka tidak susah payah berlayar lebih jauh dalam mencari ikan hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan nelayan dalam memperoleh ikan. Senada dengan pernyataan dari SY yang merupakan salah satu masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Pengelolaan terumbu karang ini memberikan manfaat yang baik buat kami masyarakat karena dengan terjaganya ekosistem terumbu karang secara tidak langsung akan membuat ikan-ikan berlimpah dan kami para nelayan tidak perlu berlayar jauh-jauh lagi mencari ikan”.(Hasil wawancara dengan SY 04 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuanpengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dapat memberikan manfaat bagi para nelayan di Kabupaten Wakatobi dengan terjaganya kelestarian terumbu karang dapat membuat biota-biota seperti ikan-ikan melimpah yang bisa meningkatkan kualitas tangkap para nelayan melimpah.

Kemudian dilakukan wawancara dengan SD selaku masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Dengan menjaga kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat membuat kami para nelayan tidak takut berlayar jauh untuk mendapatkan ikan karena jika pemerintah tidak cepat mengatasi masalah seperti pemboman ikan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa saja ikan-ikan akan mulai berkurang di sekitaran laut Wakatobi karena lingkungan

tempat tinggalnya seperti terumbu karang itu sudah rusak”.(Hasil wawancara dengan SD 05 Maret 2018).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pesisir diatas menunjukkan bahwa tindakan yang diambil pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk melestarikan terumbu karang melalui strategi pengelolaan terumbu karang direspon positif oleh masyarakat terutama para nelayan karena laut yang merupakan tumpuan hidup mereka. Namun pemerintah juga harus efektif dalam mensosialisasikan pengelolaan terumbu karang baik itu pada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi.

### **3.c. Daerah Perlindungan laut**

Daerah Perlindungan laut adalah tahap akhir pemilihan strategi pengelolaan terumbu karang yang di tentukan oleh para perumus strategi. Pada tahap ini keputusan yang diambil oleh para perumus strategi sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu strategi. Berikut hasil wawancara dengan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Dalam menetapkan pilihan strategi kami memilih strategi DPL yang berbasis masyarakat. Pemilihan ini dilakukan karena kami melihat strategi tersebut benar-benar maksimal dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Melalui koordinasi dengan *COREMAP II* kami menetapkan dibentuknya Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 63 lokasi Kabupaten Wakatobi dengan model pengelolaan berbasis masyarakat sebagai pengguna sumber daya memiliki peran aktif untuk menjaga kelestarian terumbu karang. (wawancara OW, 05 Maret 2018).

Hasil data diatas menunjukkan bahwa pilihan strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi ditetapkan dengan langkah-langkah

menetapkan kawasan-kawasan perlindungan dengan melibatkan langsung masyarakat. Bahwa dari, oleh, dan untuk masyarakat artinya dari masyarakat yang berinisiasi dan mereka juga yang proses sampai penetapan daerah perlindungan laut. Sedangkan wawancara dengan SM salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mengatakan bahwa:

“...Strategi pembentukan DPL dalam pengelolaan terumbu karang ini dengan menggunakan beberapa strategi dan kegiatan seperti menjaga dan melestarikan ekosistem terumbu karang serta habitat-habitat yang berhubungan dengan terumbu karang yaitu dengan upaya menjaga dan meningkatkan kualitas produksi perikanan dan perlindungan pantai melalui sosialisasi”.(Hasil wawancara dengan WD 05 Maret 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yaitu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk melestarikan terumbu karang dengan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang. Selanjutnya wawancara dengan LS salah satu staf lain Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Kegiatan-kegiatan strategi DPL dalam pengelolaan terumbu karang ini juga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan DPL dimana diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam penangkapan ikan bukan hanya itu melalui DPL ini juga masyarakat diberikan pelatihan usaha mandiri sehingga nelayan tidak hanya mengadakan pendapatannya sebagai nelayan”.(Hasil wawancara dengan LS 06 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan strategi DPL yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi bukan hanya terfokus pada kelestarian terumbu karang tetapi pemerintah juga melakukan pelatihan-pelatihan

kepada masyarakat mengenai usaha mandiri. Hal ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Senada dengan pernyataan dari MD yang merupakan salah satu masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Bagi saya strategi DPL ini memberikan manfaat yang menguntungkan bagi kami yang berprofesi sebagai nelayan karena bukan hanya memberikan pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang tetapi juga pemerintah memberikan pelatihan bagaimana kami nelayan tidak hanya bertumpuan pada pendapatan kami sebagai nelayan tetapi harus memiliki usaha-usaha mandiri juga”.(Hasil wawancara dengan MD 05 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan DPL bukan hanya menjaga kelestarian terumbu karang tetapi juga memberikan pelatihan usaha mandiri bagi para nelayan dan sangat memberikan kontribusi yang positif hal ini sangat penting untuk keberlangsung strategi DPL yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan SD salah satu masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Strategi DPL berbasis masyarakat ini sangat bagus karena melibatkan masyarakat langsung dalam mengelola terumbu karang. Tetapi pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah masih kurang sehingga kami kadang belum memahami secara keseluruhan mengenai strategi DPL ini”.(Hasil wawancara dengan SD 05 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi DPL berbasis masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Wakatobi sangat bagus serta memberikan respon positif oleh masyarakat. Strategi melibatkan langsung masyarakat bisa memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan terumbu karang. Namun, sesuai hasil wawancara diatas pemerintah belum optimal dalam

memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengarahkan masyarakat dalam melestarikan terumbu karang melalui strategi DPL berbasis masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada masyarakat agar mereka dapat memahami bagaimana melestarikan terumbu karang melalui strategi DPL tersebut

#### **4. Implementasi Strategi**

Implementasi strategi merupakan rencana-rencana strategi pada tahapan sebelumnya yang akan dijabarkan dalam tindakan. Dalam proses manajemen strategi belum dapat dikatakan selesai setelah organisasi menetapkan strategi yang ditempuh melainkan dia harus merumuskan strategi tersebut kedalam tindakan. Peneliti akan menjelaskan Implementasi strategi pengelolaan terumbu karang yang dikelompokkan kedalam beberapa indikator yaitu, (a.) Pengawasan pemerintah terhadap kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang, (b.) Kualitas SDM.

##### **4.a. Pengawasan Pemerintah**

Pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap kawasan pengelolaan terumbu karang. Pengawasan ini merupakan peranan pemerintah yang sangat penting dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Dalam mencapai pelaksanaan strategi yang maksimal pemerintah harus senantiasa melakukan patroli pengawasan secara terus-menerus. Beda halnya dengan pengamatan peneliti selama dilapangan.

Peneliti menemukan bahwa upaya pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi itu masih kurang. Contoh kecil masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan maraknya pengambilan batu karang untuk bahan bangunan, kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan terumbu karang. Hasil wawancara bersama dengan SM staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.

“...Pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dapat dikatakan masih kurang karena masih kurangnya tenaga pengawas dan kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan patrol-patroli pengawasan pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang”.(wawancara SM, 06 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan terumbu karang masih dikatakan minim dikarenakan kurangnya tenaga pengawas serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Pada hal pemerintah Kabupaten Wakatobi memiliki tugas yang penting dalam melindungi dan mengawasi terumbu karang bahkan sangat mendominasi.

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan MD selaku masyarakat Kabupaten Wakatobi dengan...

“...Saya rasa Pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi masih kurang karna patroli-patroli pengawasan itu dilakukan dua kali dalam sebulan. Hal ini diakibatkan kurangnya tenaga-tenaga pengawas bayangkan kita harus melakukan patroli hanya dua orang didaerah yang luas ini. (wawancara MD, 05 Februari 2018).

Hasil pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurang pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Masih perlunya peningkatan pengawasan pemerintah pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga-tenaga pengawas dan dorongan serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan patroli. Hal ini diperlukan agar pengawasan pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang dapat dikendalikan dan memperoleh kelestarian terumbu karang. Senada dengan pernyataan SD yang merupakan salah satu masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Wujud pengawasan pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang bisa dikatakan masih kurang. Pemerintah perlu meningkatkan lagi pengawasan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga-tenaga pengawas serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan terumbu karang dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat karna pemerintah saja tidak akan cukup untuk melakukan pengawasan”.(Hasil wawancara dengan SD 05 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan terumbu karang masih kurang. Pemerintah daerah harus mengajak atau mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan terumbu karang dengan melibatkan masyarakat membentuk kelompok-kelompok pengawas pengelolaan terumbu karang agar lebih memudahkan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan terumbu karang.

Selanjutnya wawancara dengan WD selaku anggota LSM Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataanya:

“...Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus lebih meningkatkan pembinaan dan pembimbingan kepada tenaga-tenaga petugas ataupun masyarakat, dukungan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas pengawas dengan cara dilatih dan memberikan dorongan kepada mereka”.(Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa harus adanya peningkatan dalam pembinaan tenaga-tenaga pengawas ataupun masyarakat yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan terumbu karang serta dukungan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kegiatan pengawasan pengelolaan terumbu karang.

Kemudian dilakukan wawancara dengan HR selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Seharusnya pemerintah Kabupaten Wakatobi harus melakukan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang karena sarana dan prasarana dapat menunjang pengawasan pengelolaan terumbu karang agar berjalan efektif. Sarana dan prasarana yang belum maksimal ini akan menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan HR 30 Febuari 2018).

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi sangat penting. Pemerintah Kabupaten Wakatobi diharapkan untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana dalam pengelolaan terumbu karang agar pelaksanaan strategi yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal. Senada dengan pernyataan SY selaku masyarakat pesisir Kabupaten Wakatobi. Berikut pernyataannya:

“...Sesuai dengan apa yang saya lihat kalau sarana dan prasarana dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi masih kurang. Salah satu contohnya pengadaan posko-posko pengawas itu masih kurang

didirikan di pesisir pantai padahal posko-posko ini sangat penting untuk tempat tenaga-tenaga pengawas dalam mengawasi laut Kabupaten Wakatobi”.(Hasil wawancara dengan SY 04 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kendala yang didapatkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi dimana masih belum maksimalnya pengawasan dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Padahal sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan terumbu karang. Kurangnya sarana dan prasarana ini menghambat proses pengawasan pengelolaan terumbu karang. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pengawasan pengelolaan terumbu karang.

#### **4.c. Kualitas SDM**

Kualitas SDM dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi merupakan tingkat kemampuan tenaga manusia dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Sebagai upaya pelaksanaan strategi yang penting dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Namun, hasil wawancara peneliti dilapangan menunjukan bahwa masih rendahnya kualitas masyarakat dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang. Berikut hasil wawancara peneliti untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. hasil wawancara dengan SY masyarakat Kabupaten Wakatobi.

“...Persepsi kami masyarakat masih kurang memahami penting pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang karena masih kurangnya

sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah. Seharusnya sosialisasi itu dilakukan secara rutin minimal 2 kali seminggu serta diadakannya pembinaan kepada kami masyarakat minimal 1 kali dalam sepekan”. (wawancara SY, 04 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat belum memahami akan pentingnya pelaksanaan pengelolaan terumbu karang karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi pada hal pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama terumbu karang. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh masyarakat pesisir SD lainnya. Berikut pernyataan:

“...Kualitas SDM dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi itu perlu ditingkatkan lagi. Agar masyarakat lebih tau akan pentingnya pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang seperti melakukan pelatihan atau mengadakan kelas-kelas untuk memberikan pengetahuan”. (wawancara SD, 05 Maret 2018).

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas SDM dalam pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan melakukan pembinaan akan pentingnya pelaksanaan strategi dalam pengelolaan terumbu karang. Pemerintah harus lebih mengupayakan melakukan pelatihan terhadap masyarakat maupun tenaga-tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WD selaku anggota LSM Kabupaten Wakatobi, mengungkapkan bahwa:

“...Untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Wakatobi menurut saya pemerintah harus berusaha melakukan pelatihan-pelatihan mengenai

pengelolaan terumbu karang minimal satu minggu satu kali. Pemerintah harus mengupayakan masyarakat hadir terutama para nelayan atau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan wilayah pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018).

Melihat dari hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh anggota LSM Kabupaten Wakatobi bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM pemerintah Kabupaten Wakatobi harus melakukan pelatihan agar masyarakat memahami akan pentingnya pengelolaan terumbu karang. Pelatihan ini juga bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas SDM tetapi dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan. Senada dengan pernyataan LS yang merupakan salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...Dalam menjalankan pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas SDM baik itu masyarakat maupun tenaga-tenaga aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan terumbu karang. Peningkatan itu kami lakukan dengan melakukan pelatihan, sosialisasi mengenai pengelolaan terumbu karang. Pemerintah mengupayakan agar masyarakat dan tenaga-tenaga aparatur bisa mendapatkan pelatihan dan memahami akan pentingnya pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan LS 06 Maret 2018)

Menurut hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh staf Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Wakatobi bahwa pemerintah berusaha memberikan pelatihan bahkan sosialisasi kepada masyarakat maupun tenaga-tenaga aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan terumbu karang. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan pemerintah agar masyarakat memahami dengan baik dan dapat diajak kerja sama untuk sama-sama melestarikan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan OW selaku

kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...Langkah-langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yakni salah satunya kami mengadakan pelatihan konsultan publik mengenai pengelolaan terumbu karang dengan mendatangkan narasumber dari Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini diikuti oleh pihak-pihak seperti masyarakat, pemda, serta tokoh-tokoh adat dan LSM untuk memberikan pendidikan kepada seluruh peserta pelatihan.

Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah berperan penting dalam memberikan arahan serta saran untuk melestarikan terumbu karang karena pemerintah daerah sebagai panutan bahkan motivator untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi dalam memberikan pelatihan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan beberapa wawancara diatas bahwa pemerintah berusaha memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat namun masyarakat menganggap bahwa pelatihan-pelatihan serta sosialisasi yang diberikan masih kurang. Sehingga diharapkan agar pemerintah rutin dalam melakukan pelatihan serta sosialisasi mengenai pengelolaan terumbu karang.

### **C. Keunggulan dan Kendala Manajemen Strategi dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi**

Keunggulan manajemen strategi merupakan manfaat yang diperoleh dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi. Manfaat ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik untuk mengembangkan strategi-strategi berikutnya. Sedangkan kendala manajemen strategi merupakan hambatan yang ada dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Ketidak berhasilan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keunggulan dan kendala

manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang peneliti akan menjelaskan beberapa faktor dari keuntungan dan kendala manajemen strategi yakni meliputi: (1.) Keunggulan manajemen strategi seperti, (a.) Acuan pengelolaan terumbu karang selanjutnya, (b.) Kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang, (2.) Kendala manajemen strategi seperti, (a.) Tidak merivew kembali strategi sebelumnya (b.) Kinerja kurang efektif.

### **1. Keunggulan Manajemen Strategi**

Keunggulan manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang merupakan manfaat yang diperoleh dari keputusan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Keunggulan merupakan keberhasilan yang diperoleh dari penerapan manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang. Dari hasil data wawancara dengan para informan mengenai pengidentifikasian proses manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa keuntungan manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yaitu, (a.) Acuan pengelolaan terumbu karang selanjutnya, (2.) Kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang.

#### **1.a. Acuan pengelolaan terumbu karang selanjutnya**

Acuan pengelolaan terumbu karang merupakan langkah-langkah yang akan dijadikan rujukan untuk pengelolaan terumbu karang selanjutnya. Acuan ini akan menjadi pusat rujukan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam strategi pengelolaan yang akan dirumuskan selanjutnya. Manfaat manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang ini akan menjadi arah pemerintah dalam

mengambil keputusan pengelolaan terumbu karang selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, mengungkapkan bahwa:

“...Pengidentifikasian program pengelolaan terumbu karang melalui pelaksanaan manajemen strategi ini sangat bagus karena akan memberikan keuntungan bagi kami pemerintah misalnya dengan penelitian ini kami bisa menjadikannya sebagai bahan rujukan untuk pembuatan strategi selanjutnya”.(Hasil wawancara dengan OW 30 Feburari 2018).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi diatas dapat disimpulkan bahwa pengidentifikasian program pengelolaan terumbu karang melalui manajemen strategi memberikan manfaat yang penting bagi pemerintah Kabupaten Wakatobi karena dengan hal tersebut pemerintah bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan terumbu karang selanjutnya. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan HR selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...Pelaksanaan strategi dalam pengelolaan terumbu karang ini memberikan dampak positif bagi kami pemerintah karena dengan adanya pengidentifikasian program pengelolaan ini kami bisa lebih teliti lagi dalam mengelola terumbu karang. Hal-hal yang masih kurang seperti pengadaan posko-posko pengawas harus diperbanyak”.(Hasil wawancara dengan HR 30 Februari 2018).

Hasil data diatas yang disampaikan oleh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang dapat memberikan dampak yang positif bagi para pengambilan keputusan dalam pengelolaan terumbu karang selanjutnya. Selain itu, dengan adanya pengidentifikasian tersebut pemerintah Kabupaten

Wakatobi akan menganalisis dengan hati-hati isu-isu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang. Senada dengan pernyataan WD selaku anggota LSM Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...Dengan adanya pengidentifikasian program pengelolaan terumbu karang melalui pelaksanaan manajemen strategi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah karena dengan hal tersebut pemerintah akan lebih memperhatikan dengan hati-hati dalam memutuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk pengelolaan terumbu karang selanjutnya”.(Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dengan salah satu anggota LSM Kabupaten Wakatobi dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi pengelolaan terumbu karang memberikan manfaat bagi pemerintah dimana langkah-langkah yang akan di lakukan pemerintah selanjutnya dalam pengelolaan terumbu karang akan dilakukan secara hati-hati dengan merujuk pada pengelolaan terumbu karang sebelumnya.

Menurut hasil wawancara dengan SY selaku masyarakat pesisir yang mengatakan bahwa:

“...saya rasa manfaat pengelolaan terumbu karang sangat penting apalagi bagi kami nelayan karena jika kelestariannya terjaga dengan baik kami nelayan tidak perlu jauh-jauh mencari ikan selain kami bisa mendapatkan panen yang melimpah”.(Hasil wawancara dengan SY 04 Maret 2018).

Melihat dari hasil wawancara dengan masyarakat pesisir diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat pengelolaan terumbu karang tidak hanya dirasakan pemerintah dalam pengambilan keputusan tetapi juga dapat dirasakan masyarakat khususnya para nelayan yang menjadi tumpuan hidup dengan hasil laut. Nelayan akan lebih mudah dalam mencari ikan karena kelestarian terumbu karang yang terjaga dengan baik akan mendatangkan ikan-ikan melimpah. Senada dengan

pernyataan SD yang merupakan salah satu masyarakat pesisir yang menyatakan bahwa:

“...Pengelolaan terumbu karang ini dapat mendatangkan banyak manfaat terutama bagi kami para nelayan yang menjadikan laut sebagai tumpuan hidup kami. Upaya pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah melalui pengelolaan terumbu karang seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan memberikan pengetahuan tersendiri kepada kami”.(Hasil wawancara dengan SD 05 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dengan masyarakat pesisir peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan terumbu karang dapat memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat terutama para nelayan karena mereka tidak perlu berlayar jauh untuk mendapatkan hasil tangkap yang banyak yang beresiko bagi keselamatan mereka karena dengan terjaga kelestarian terumbu karang akan membuat ikan-ikan berlimpah sekitaran lingkungan laut Wakatobi.

### **1.b. Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kelestarian Terumbu Karang**

Kesadaran masyarakat merupakan pemahaman yang harus dimengerti masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Dengan adanya pengelolaan terumbu karang ini, pemerintah ingin masyarakat memahami bahwa penting menjaga kelestarian terumbu karang untuk kehidupan yang akan datang. Masyarakat harus memahami bahwa pengelolaan terumbu karang ini dapat terjaga dengan baik jika masyarakat mengerti tanggung jawab mereka yang selalu berinteraksi langsung dengan lingkungan laut. Berikut hasil wawancara dengan OW selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...manfaat pelaksanaan manajemen strategi ini bukan hanya dirasakan oleh pemerintah tetapi dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang serta dapat menumbuhkan kesadaran pemda untuk memfasilitasi pengawasan pengelolaan terumbu karang seperti pengadaan posko-posko, alat-alat menyelam dll. Karena ekosistem terumbu karang amat penting bagi keberlanjutan sumber daya yang ada”.(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sumber daya yang ada. Selain itu pengelolaan terumbu karang ini juga tidak lain untuk meyakinkan masyarakat agar mengurangi laju eksploitasi yang dilakukan masyarakat terhadap terumbu karang. Sedangkan hasil wawancara dengan LS salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...Melalui pengelolaan terumbu karang ini kami dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang yang menjadi faktor utama yang kurang menyadari untuk menjaga kelestarian terumbu karang adalah masyarakat karena merekalah yang berperan aktif terhadap kelangsungan pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan LS 06 Maret 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan terumbu karang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dimana pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang karena terkadang masyarakat tidak berfikir akibat dari perilaku mereka yang dapat merusak lingkungan ekosistem terumbu karang.

Menurut wawancara dengan WD selaku anggota LSM Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

“...Peran untuk menyadarkan masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang sangatlah dibutuhkan. Melalui sosialisasi serta pelatihan-pelatihan pengelolaan terumbu karang ini secara tidak langsung pemerintah dapat meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat untuk memelihara kelestarian terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas dengan salah satu anggota LSM peneliti dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat menjaga kelestarian terumbu karang melalui pengelolaan terumbu karang sangat bermanfaat. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai sumber daya yang ada karena tidak selamanya sumber daya tersebut akan ada.

Selanjutnya wawancara dengan SY selaku masyarakat pesisir masyarakat mengatakan bahwa:

“...Saya rasa strategi pengelolaan terumbu karang ini sangat bagus karena kami sebagai masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang. Kami dapat menyadari bahwa kalau bukan kita yang menjaga kelestarian daerah kita siapa lagi. Meski masih banyak juga masyarakat yang tidak peduli mengenai pengelolaan terumbu karang meski mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut”.(Hasil wawancara dengan SY 04 Maret 2018).

Sesuai hasil wawancara diatas dengan masyarakat bahwa manfaat strategi pengelolaan terumbu karang dalam menyadarkan masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang direspon positif. Pengelolaan terumbu karang ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang serta dapat membuat masyarakat memahami bahwa tanggung jawab mereka untuk

menjaga kelestarian terumbu karang karena masyarakatlah yang hampir setiap hari berinteraksi langsung dengan lingkungan laut.

## **2. Kendala Manajemen Strategi dalam Pengelolaan Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi**

Kendala manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi merupakan kelumpuhan dalam pencapaian program pengelolaan terumbu karang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Hasil data wawancara dengan para informan diatas mengenai pengidentifikasian proses pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang memungkinkan manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi mengalami kegagalan. Adapun beberapa variabel tersebut yaitu, (a.) Kelumpuhan dalam menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal, (b.) Kinerja kurang efektif.

### **2.a. Kelumpuhan dalam menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal**

Hambatan dalam strategi pengelolaan terumbu karang bisa saja terjadi karena pembuat keputusan kurang menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang pada hal sebelum membuat keputusan untuk mengimplementasikan pengelolaan terumbu karang harus adanya analisis secara mendalam mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang agar pemerintah dapat mengantisipasi gejala-gejala yang akan terjadi kedepan. Berikut hasil wawancara dengan WO

selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

“...Tidak bisa dipungkiri hambatan yang dialami dalam pengelolaan terumbu karang adalah dalam menganalisis isu-isu lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan waktu serta dana sehingga proses analisis itu dilakukan secara mendalam”.(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Menurut hasil wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi ini diakibatkan pada saat proses analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal tidak dilakukan secara mendalam dikarenakan keterbatasan waktu serta dana untuk melakukan analisis secara mendalam. Pemerintah harus lebih efektif lagi dalam menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan terjadi kedepan. Selanjutnya wawancara dengan HR selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan:

“...Dalam setiap langkah-langkah yang ditetapkan tidak menutup kemungkinan akan ada hambatan yang dialami karena tidak semuanya akan sempurna pastia akan ada hambatan-hambatan seperti hambatan yang ada dalam pengelolaan terumbu karang ini salah satunya karena kurangnya analisis secara mendalam mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan HR 30 Februari 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap langkah-langkah yang diambil pemerintah mengenai pengelolaan terumbu karang tidak dapat dipungkiri pasti akan ada hambatan-hambatan yang menjadi terhalangnya pencapaian tujuan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Hal

tersebut dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah pada saat menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan SM salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang menyatakan bahwa:

“...Kurangnya analisis yang efektif dan kurangnya kerja sama yang mengakibatkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang menjadi terhambat. Seharusnya pemerintah melakukan wawancara dan diskusi secara mendalam dengan berbagai pihak yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya”.(Hasil wawancara dengan SM 06 Maret 2018).

Melihat hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengelolaan terumbu karang diakibatkan kurangnya perhatian pemerintah dalam menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang. Pemerintah daerah diharapkan agar menganalisis dengan cermat sebelum memutuskan untuk menetapkan isu-isu lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang. Senada dengan hasil wawancara dengan SD salah satu masyarakat pesisir yang mengatakan bahwa:

“...Jika pemerintah ingin mengetahui secara cermat mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi seharusnya pemerintah daerah melakukan wawancara dengan masyarakat-masyarakat yang terlibat langsung dalam lingkungan pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan SD 04 Maret 2018).

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengetahui isu-isu lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang belum optimal karena kurangnya koordinasi serta wawancara dengan masyarakat

terutama masyarakat yang secara tidak langsung sehari-sehari bersentuhan langsung dengan lingkungan pengelolaan terumbu karang.

### **2.b. Kinerja Kurang Efektif**

Kinerja merupakan kualitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan segala sesuatu. Kinerja juga menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Salah satu hambatan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi adalah kurang efektifnya kinerja tenaga-tenaga pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. Kinerja ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya pengelolaan terumbu karang. Berikut hasil wawancara dengan OW selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

“...Hambatan dalam pengelolaan terumbu karang di Wakatobi salah satunya kurang efektifnya kinerja tenaga-tenaga pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang karena masih adanya sifat egois yang melekat dalam diri mereka selain itu mungkin kurangnya motivasi yang diberikan sehingga mereka itu lambat dalam mengerjakan sesuatu”.(Hasil wawancara dengan OW 30 Februari 2018).

Menurut hasil wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yakni sifat egois serta kurangnya motivasi yang membuat mereka lebih semangat dalam bekerja. Pemerintah daerah seharusnya lebih memberikan pelatihan-pelatihan untuk membangun semangat mereka dalam bekerja sehingga hasil kinerja yang diberikan lebih efektif. Selanjutnya hasil wawancara dengan LS salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi yang mengatakan bahwa:

“...Kurang efektifnya kinerja tenaga-tenaga pengelolaan terumbu karang disebabkan pemerintah daerah kurang memperhatikan keperluan-keperluan untuk pengelolaan terumbu karang seperti kita terkadang kurang dana serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan LS 06 Maret 2018).

Hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan sarana dan prasarana maupun dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Wakatobi sehingga mengakibatkan kinerja tenaga-tenaga pengelolaan terumbu karang menjadi kurang efektif. Senada dengan pernyataan MD salah satu masyarakat pesisir yang mengatakan bahwa:

“...Bagi saya yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja masyarakat terhadap pengelolaan terumbu karang karena masih rendahnya kemampuan kami masyarakat untuk memahami akan pentingnya pengelolaan terumbu karang serta kurangnya transfer pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan MD 05 Maret 2018).

Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pesisir diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja masyarakat karena masih minimnya pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang. Pemerintah harus lebih jeli lagi dalam memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan WD salah satu anggota LSM Kabupaten Wakatobi yang mangatakan bahwa:

“...Seperti apa yang saya lihat dan pahami kinerja pengelolaan terumbu karang kurang efektif karena pengaruh kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan mereka sehingga membuat kinerja tenaga-tenaga pengelolaan terumbu karang itu menjadi kurang. Hal ini juga memperlambat

kinerja mereka atau kesalahan persepsi dalam menafsirkan proses pengelolaan terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan WD 06 Maret 2018).

Menurut hasil data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang belum optimal karena masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan terumbu karang. Pemerintah harus menganalisis secara mendalam mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang serta meningkatkan lagi kualitas kinerja tenaga-tenaga pengelolaan terumbu karang maupun masyarakat agar lebih efektif lagi dalam melestarikan sumber daya terutama terumbu karang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses manajemen strategi dalam pengelolaan terumbu karang yang meliputi: **(1.) Analisis SWOT (eksternal)** merupakan proses manajemen strategi yang menganalisis peluang lingkungan eksternal dan ancaman lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang yang menjadi pendorong atau melemahkan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang. Namun, pada tahap ini pemerintah belum maksimal karena kurangnya koordinasi pemerintah dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang, **(2.) Analisis SWOT (internal)** yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi, dimana menganalisis kekuatan lingkungan internal serta kelemahan lingkungan internal pengelolaan terumbu karang agar dapat membantu pencapaian tujuan pengelolaan terumbu karang. Namun, belum optimal karena pemerintah kurang menganalisis secara mendalam mengenai hal tersebut, **(3.) pilihan strategi** merupakan proses manajemen strategi yang merupakan tahap penentu strategi dimana terumbu karang sehat dan berdaya guna merupakan motto yang digunakan Kabuapten Wakatobi dalam pengelolaan terumbu karang, sedangkan tujuan dalam pengelolaan terumbu karang adalah menjaga kelestarian terumbu karang serta pilihan strategi dalam pengelolaan terumbu karang adalah Daerah perlindungan laut. Namun, akan lebih optimal jika pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan juga Visi dan misi pengelolaan terumbu karang, **(4.)**

**implementasi strategi** yaitu tahap pelaksanaan strategi yang akan dijabarkan dalam tindakan pada tahap ini pemerintah sudah melaksanakan pengelolaan terumbu karang dengan baik. Namun, masih saja ada kendala-kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana serta masih minimnya kualitas SDM dalam pengelolaan terumbu karang.

2. **Keunggulan manajemen strategi** merupakan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan strategi pengelolaan terumbu karang seperti menjadi acuan pengelolaan terumbu karang selanjutnya untuk pemerintah agar lebih memperhatikan lagi hal-hal yang masih kurang seperti posko-posko pengawas dll, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. **Kendala manajemen strategi** pengelolaan terumbu karang merupakan hambatan yang dicapai dalam pengelolaan terumbu karang seperti, kurangnya analisis yang mendalam mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang serta kurang efektifnya kinerja yang diberikan baik oleh masyarakat maupun tenaga-tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan agar pemerintah lebih optimal lagi dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal pengelolaan terumbu karang dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan terumbu karang.

2. Hendaknya pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada aparat pemerintah ataupun masyarakat yang melakukan pelanggaran.
3. Kiranya terumbu karang sehat dan berdaya guna sebagai motto ini dapat diwujudkan bukan hanya dijadikan slogan semata.
4. Hendaknya pemerintah Kabupaten Wakatobi, lebih proaktif lagi dalam hal pelaksanaan strategi dalam pengelolaan terumbu karang.
5. Kiranya pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana, serta kualitas SDM dalam pengelolaan terumbu karang.
6. Hendaknya masyarakat lebih proaktif lagi dalam melaksanakan strategi pengelolaan terumbu karang.
7. Kiranya masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap kawasan pengelolaan terumbu karang.
8. Kiranya, masyarakat juga diharapkan tidak menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan untuk menangkap ikan agar ekosistem laut dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimu, Eldin, Hasan. 2013. *Pengelolaan Terumbu Karang di Daerah Perlindungan Laut di Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi*. ITB Bogor. skripsi
- Burke, Laretta, et al. 2012. *Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*. Word Resources Institute.
- CORMEP CTI. 2016. *Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. 2015. *Laporan Akhir Kajian Nilai Ekonomi Sumber Daya Kawasan Konservasi Perairan*. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Dinas Kelautan dan Perikanan. Wangi-wangi.
- Fisipol Unismuh Makassar. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar.
- Hajifu. 2011. *Coral Reef Rehabilitation dan Management Program Phase II (COREMAP II)*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
- Hamrun. 2012. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Kelestarian Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. jurnal.
- Heene, Aime et al. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Hidayati, Denny. 2014. *Riset dan Monitoring Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Laut*. xxx Press Anggota IKAPI.
- Indrawan. 2015. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jakarta. Deepublish.
- John, A, et al. 2013. *Manajemen Strategi (Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian)*. Jakarta. Selemba Empat
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Strategi Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia*. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kordi, H. Ghufron. 2010. *Ekosistem Terumbu Karang; Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

- Lubis, Bahri, Syamsul, et.al. 2016. *Rencana Aksi Nasional Konservasi Terumbu Karang*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Makmur.2013. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintah dan Pembangunan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Nugroho.2007.*Manajemen Strategi Organisasi Publik*.Jakarta.Universitas Terbuka.
- Pryono.2016.*Pengantar Manajemen*. Sudiarjo.Zifatama Publisher.
- Sedarmayanti.2009.*Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.Mandar Maju.
- Siangian. 2016.*Manajemen Strategik*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Siswandi.2009.*Aplikasi Manajemen Perusahaan*.Jakarta.Mitra Wicana.
- Subhan Begines. 2014. *Bisakah Transplantsi Karang Perbaiki Ekosistem Terumbu Karang?*. Institut Pertanian Bogor.Jurnal.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Alfa Beta CV
- Sukmara, Asep, et.al. 2001. *Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat*. Jakarta. Proyek Pesisir, CRC/URI CRMP, NRM, Secetariat Ratu Plaza Building.
- Suryawati, Hajar, Sitti. 2012. *Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang COREMAP di Wilayah Coral Triangle Indonesia Timur*. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jurnal. fall:2-8
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Utomo, Hargo. 2014. *Manajemen Strategik*. Gunadarma
- Yulius, et.al.2015. *Distribusi Spasial Terumbu Karang di Perairan Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi*. FPIK, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Jurnal
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. CV ANDI OFFSET.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Kep.38/Men/2004 *tentang pedoman umum pengelolaan terumbu karang.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 *tentang konservasi sumber daya.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2014 *tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor. 27 tahun 2007.*

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



Proses wawancara dengan kepala  
Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Wakatobi



Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi



Proses wawancara dengan salah satu masyarakat pesisir Kabupaten Wakatobi



Proses wawancara dengan masyarakat nelayan Kabupaten Wakatobi



Proses wawancara dengan nelayan Kabupaten Wakatobi



Suasana pemukiman masyarakat pesisir Kabupaten Wakatobi



Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi



Proses pemantauan terumbu karang oleh pengawas pengelolaan terumbu karang

## RIWAYAT HIDUP



WA ODE NURHUDAYA, Dilahirkan di Makoro pada tanggal 14 Desember 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak La Ode Nurdin dan Ibu Samsiar. Peneliti menyelesaikan pendidikan TK Darmawanita pada tahun 2002. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Taipabu dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 3 Wakatobi dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Binongko dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun tersebut pula peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.